



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



PROFIL GENDER KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Profil Data Gender Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 berisikan isu gender dalam bentuk analisis data gender yang terjadi di wilayah kabupaten Bengkayang. Pemaparan data terkait komposisi atau demografi antara laki-laki dan perempuan terkait responsif gender dalam pembangunan berkelanjutan. Meliputi keseluruhan bidang yaitu, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, komposisi serta peran perempuan di bidang pemerintahan dan politik sebagai keterwakilan dalam menyuarkan aspirasi perempuan terkait pembangunan berkelanjutan agar mewujudkan kesetaraan gender.

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi bahan awal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang guna memetakan wilayah mana saja yang terjadi kesenjangan gender dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan anggaran hingga proses pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan atau program yang dijalankan.

Penyajian informasi terkait data dan demografi diuraikan secara sederhana dalam bentuk grafik, tabel, dan analisis sederhana agar mudah dipahami. Sehingga publik atau masyarakat juga ikut terlibat dalam kesetaraan gender dalam pembangunan di pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Dalam penyusunan Buku Profil Gender Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 disadari masih jauh dari sempurna disebabkan keterbatasan dan kekurangmampuan baik dalam pengumpulan data, penyusunan maupun penyajian. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan mutu Buku Profil Gender Kabupaten Bengkayang di tahun yang akan datang diharapkan masukan baik saran maupun kritik, serta partisipasi dari semua pihak agar data atau informasi yang disajikan lebih akurat, tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran berupa masukan ataupun informasi terkait kondisi gender dalam penyusunan buku ini.

Semoga dengan terbitnya Buku Profil Gender Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, November 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



dr. I MADE PUTRA NEGARA, M. M
Pembina Utama Muda
NIP 19661116 199903 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sasaran.....	4
1.5 Sumber Data	4
1.6 Pengelompokan Data.....	4
1.7 Visi dan Misi	5
1.8 Letak Geografis Kabupaten Bengkayang	6
BAB II KONTRUKSI GENDER	10
2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	11
2.2 Angka Harapan Hidup (AHH)	12
2.3 Pengeluaran Per Kapita	14
2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	15
2.5 Keterwakilan Perempuan di Parlemen	16
2.6 Perempuan sebagai Tenaga Profesional	16
2.7 Sumbangan Pendapatan Perempuan	17
2.8 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	18
BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN	19
3.1 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	19
3.2 Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)	21
3.3 Penyebaran Penduduk.....	22
3.4 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	23
3.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	24
3.6 Akta Kelahiran Anak.....	24
BAB IV BIDANG KESEHATAN.....	26
4.1 Angka Harapan Hidup	26
4.2 Angka Keluhan Sakit.....	27
4.3 Penduduk Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	29
4.4 Kepemilikan Jaminan Kesehatan	30

4.5 Angka Kematian Ibu (AKI).....	31
4.6 Pertolongan Persalinan dengan Kompetensi Kebidanan.....	32
4.7 Pemberian ASI Eksklusif Pada Baduta (Usia 0-23 Bulan)	33
4.8 Pelayanan Imunisasi Pada Balita (Usia 0-59 Bulan).....	35
4.9 Berat Badan Bayi Rendah.....	36
4.10 Angka Kematian Bayi.....	38
4.11 Posyandu.....	38
4.12 Keluarga Berencana	39
4.13 Usia Perkawinan Pertama (UKP)	40
BAB V BIDANG PENDIDIKAN	42
5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	43
5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	44
5.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	45
5.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	46
5.5 Harapan Lama Sekolah (HLS)	47
5.6 Angka Melek Huruf	48
5.7 Akses Teknologi dan Penggunaan Elektronik	50
5.8 Penduduk Berdasarkan Jenis Tamatan Pendidikan Tertinggi	52
5.9 Angka Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga	54
BAB VI BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	56
6.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja	56
6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	57
6.3 Lapangan Pekerjaan Utama.....	59
6.4 Status Pekerjaan.....	59
6.5 Angka Kemiskinan	61
6.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	63
BAB VII KETERWAKILAN PEREMPUAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK..	65
7.1 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	65
7.2 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	66
7.2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	67
7.2.2 Kepemimpinan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa	72
BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	73
8.1 Sumber Data Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	73
8.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024	74
8.3 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023	79
8.3.1 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dewasa, Tahun 2023.....	79

8.3. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2023	79
8.4 Sarana Pelayanan.....	81
BAB IX PENUTUP	82
9.1 Kesimpulan	82
9.1.1 Ketersediaan Data	82
9.1.2 Kontruksi Gender	82
9.1.3 Kependudukan	83
9.1.4 Kesehatan.....	83
9.1.5 Pendidikan	84
9.1.6 Ekonomi dan Ketenagakerjaan	84
9.1.7 Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan.....	85
9.1.8 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	85
9.2 Saran	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024 (persen)	11
Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin (persen) Nasional, Prov. Kalimantan Barat, dan Kab. Bengkayang, Tahun 2021-2024 ...	12
Grafik 2.3 Angka Harapan Hidup (persen) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	13
Grafik 2.4 Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin (persen) di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	
Grafik 2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Bengkayang Tahun, 2021-2024.....	14
Grafik 2.6 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang Tahun, 2021-2024.....	16
Grafik 2.7 Presentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Nasional, Prov. Kalimantan Barat, dan Kab. Bengkayang, Tahun 2021-2024	17
Grafik 2.8 Sumbangan Pendapatan Perempuan Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024.....	17
Grafik 2.9 Indeks ketimpangan Gender (IKG) Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024.....	18
Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	21
Grafik 3.2 Angka Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	21
Grafik 3.3 Kepadatan Penduduk per Km ² di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2025	22
Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kabupaten Bengkayang	23
Grafik 4.1 Angka Harapan Hidup Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024	27
Grafik 4.2 Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	27
Grafik 4.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir	
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	29
Grafik 4.4 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	30
Grafik 4.5 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	30

Grafik 4.6 Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Melahirkan 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Proses Melahirkan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	33
Grafik 4.7 Jumlah Posyandu di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	38
Grafik 4.8 Median Usia Kawin Pertama Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, di Kabupaten Bengkayang, 2021-2024.....	40
Grafik 4.9 Perempuan 20–24 Tahun yang Kawin Pertama <18 Tahun di Kabupaten Bengkayang	41
Grafik 5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang	44
Grafik 5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	45
Grafik 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, 2024	46
Grafik 5.4 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kab. Bengkayang	47
Grafik 5.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang	48
Grafik 5.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bengkayang, 2024	49
Grafik 5.7 Persentase Penggunaan TI Penduduk 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	50
Grafik 5.8 Akses Internet (persen) Penduduk 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	51
Grafik 5.9 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	53
Grafik 6.1 Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	56
Grafik 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	57
Grafik 6.3 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat pendidikan yang Ditamatkan, di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	58
Grafik 6.4 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan, Jumlah (ribu/jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin, di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	62
Grafik 6.5 Persentase Jumlah Usaha, Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2023.....	63
Grafik 7.1 Jumlah Camat, Lurah, dan Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2023.....	72

Grafik 8.1 Korban Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Usia di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	75
Grafik 8.2 Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	75
Grafik 8.3 Korban Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Pekerjaan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	76
Grafik 8.4 Korban Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Tempat Kejadian Di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Berdasarkan Konsumsi Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Bengkayang Tahun, 2022-2024	14
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	19
Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	24
Tabel 3.3 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Karakteristik di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	25
Tabel 4.1 Kasus Penyakit di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	28
Tabel 4.2 Jumlah dan Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2023	31
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 0–23 Bulan (Baduta) Yang Pernah Diberi ASI dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI Menurut Karakteristik di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	34
Tabel 4.4 Balita (Usia 0-59 Bulan) yang mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu Berobat/ Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi Menurut Karakteristik di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	35
Tabel 4. 5 Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) Menurut karakteristik dan Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	36
Tabel 4.6 Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Berat Badan dari ALH yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	37
Tabel 4.7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat KB/Cara Tradisional untuk Menunda/Mencegah Kehamilan di Kabupaten Bengkayang, 2024	39
Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	43
Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024	44
Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kab.Bengkayang, 2021-2024	44
Tabel 5.4 Presentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	49

Tabel 5.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024	54
Tabel 5.6 Kepala Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024.....	55
Tabel 6.1 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha dan Jenis kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024 (persen)	59
Tabel 6.2 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	61
Tabel 7.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin (orang) di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	66
Tabel 7. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	67
Tabel 7.3 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	68
Tabel 7.4 Jumlah PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	68
Tabel 7.5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	69
Tabel 7.6 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024	70
Tabel 8.1 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024.....	8
Gambar 1.2 Luas Daerah Kecamatan (Km ²) di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024 ...	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan sosial dan budaya masyarakat. Sebagai contoh dalam rumah tangga, peran laki-laki yang bekerja dan perempuan melakukan tugas domestik rumah tangga.

Budaya patriaki adalah sistem sosial dimana dominasi laki-laki sangat kuat daripada peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pada 18 Desember 1979 pemerintah Indonesia mengadopsi perjanjian internasional Konvensi CEDAW, atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan dan diberlakukan sejak 3 September 1981.

CEDAW merupakan komitmen Indonesia bersama negara-negara PBB lainnya agar perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki di semua aspek kehidupan, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Tiga prinsip dasar CEDAW ialah non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara.

Salah satu aksi dalam mendukung CEDAW, pemerintah Indonesia membuat kebijakan PUG atau Pengurusutamaan Gender sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional dan segala kebijakan pada tingkat nasional dan daerah. PUG dijalankan pada semua instansi pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kebijakan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pemerintah Indonesia bersama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan agenda global, *Sustainable Development Goals (SDG)* atau dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG memiliki 17 tujuan yang rencananya dapat diwujudkan bersama pada tahun 2030 mendatang. Kesetaraan Gender masuk dalam tujuan ke 5 dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk keterlibatan anak dalam melindungi hak mereka.

Profil Gender disusun untuk memetakan kesenjangan gender atau di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Profil Gender Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 berisi pemaparan data dan analisis tentang kondisi gender laki-laki dan perempuan di wilayah kabupaten Bengkayang. Tujuan publikasi ini disusun agar membantu dalam merumuskan kebijakan supaya lebih tepat sasaran dalam upaya pembangunan yang berlandaskan kesetaraan gender. Selain itu juga sebagai hasil evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau standar dan memastikan penjangkauan wilayah-wilayah terpencil atau darurat di Kabupaten Bengkayang yang diprioritaskan lebih dahulu.

Publikasi pemaparan kondisi gender ini juga ditujukan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Bengkayang. Melalui hasil survei data yang menunjukkan kesenjangan gender dapat menyadarkan bagi kita, bahwa bersikap adil dan peduli sebagai upaya menghilangkan diskriminasi di berbagai bidang. Perempuan juga diharapkan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, politik, dan bidang lainnya khususnya terkait posisi kepemimpinan. Khususnya terkait perlindungan sosial, pencegahan kekerasan terhadap perempuan diharapkan tidak terjadi kasus-kasus baru yang merampas hak-hak perempuan.

1.2 Dasar Hukum

Pengumpulan data hingga penerbitan Profil Gender Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Berikut adalah dasar hukum terkait kesetaraan gender yang harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan agar pembangunan nasional adil dan merata bagi laki-laki dan perempuan:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- h) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

- i) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak;
- n) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak Kabupaten Bengkayang Tercatat Kelahirannya;
- o) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Integrasi Satu Data Untuk Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang
- p) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak;
- q) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1.3 Maksud dan Tujuan

Publikasi Profil Gender Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 bermaksud untuk mengumpulkan informasi dan data terhadap peran dan keterlibatan Perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Selain itu paparan data gender agar menjadi acuan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan ramah perempuan di lingkungan Kabupaten Bengkayang

Profil Gender diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a) Data terpilah gender dapat dilihat secara demografis tersaji pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Meliputi berbagai bidang pembangunan diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan dan sektor publik lainnya yang menjadi isu gender.
- b) Data kebijakan, program, atau kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkayang dan organisasi/lembaga masyarakat tersaji sebagai upaya pemberdayaan dan anti diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Bengkayang.
- c) Adanya analisis deskriptif terkait capaian pemberdayaan perempuan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Analisis dilaksanakan dengan tersedianya data primer dan

sekunder guna melihat pencapaian indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, posisi perempuan di parlemen, serta dalam kebijakan pelaksanaan program pemberdayaan yang responsif gender di Kabupaten Bengkayang.

- d) Dengan ketersediaan data gender diatas, diharapkan meningkatkan efektifitas pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan.
- e) Tersedia Profil Gender sebagai alat ukur untuk menentukan program tahunan pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1.4 Sasaran

Seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung dalam lembaga Pemerintah, Organisasi Perempuan, LSM, Organisasi Profesi, Organisasi, Organisasi swasta, Organisasi keagamaan maupun pada masyarakat paling kecil yaitu keluarga. Khususnya pejabat atau penyusun kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan dimasa yang akan datang, di wilayah Kabupaten Bengkayang.

1.5 Sumber Data

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Integrasi Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang, yang tercantum pada Pasal 11, sumber data terdiri atas:

1. Data statistik dasar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Data statistik sektoral dan statistik khusus diperoleh dari perangkat daerah dan instansi lainnya.
3. Data geospasial diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
4. Data geospasial tematik diperoleh dari perangkat daerah dan sumber lainnya.

Dalam konteks data gender, data statistik sektoral dan khusus mencakup data terpilih berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, status pendidikan, dan kesehatan, yang dikumpulkan oleh instansi terkait, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

1.6 Pengelompokan Data

Pasal 14 dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2022 menjelaskan pengumpulan data pembangunan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, serta pihak lainnya.

2. Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara: a. secara langsung dari sumber data; dan b. secara tidak langsung
3. Pengumpulan data pembangunan secara langsung (poin 2a) dilakukan melalui sensus, survei, dan metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan supervisi BPS sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung (poin 2b) dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia dari pihak lain.
5. Data yang dihasilkan harus dilengkapi dengan metadata agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
6. Pemerintah daerah dan pemerintah desa menetapkan penanggung jawab data sebagai otorisator data.

Selanjutnya, data yang diterima dikelompokkan oleh petugas atau sistem sesuai jenisnya. Setelah itu dilakukan penyuntingan dan penyandian, kemudian data disimpan baik secara digital maupun manual. Data gender termasuk dalam kelompok data sektoral yang memerlukan pengolahan secara terpilah dan spesifik. Penyandian dan metadata harus mampu menangkap dimensi kesetaraan gender agar data tersebut relevan dan dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan yang inklusif.

1.7 Visi dan Misi

Kesetaraan gender merupakan tugas, pokok, dan fungsi utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Bengkayang. Oleh sebab itu Dinsos P3A harus memastikan setiap pelaksanaan kebijakan memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Pemerintah Kabupaten Bengkayang berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentu saja dengan bantuan berbagai macam pihak baik perangkat daerah lain, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, organisasi/lembaga pemerintahan maupun swasta, masyarakat, serta pihak lainnya yang mengupayakan terwujudnya Kabupaten Bengkayang responsif gender.

Dalam memastikan kebijakan di setiap bidang memenuhi standar pembangunan nasional yang responsif gender, pemerintahan Kabupaten Bengkayang berpegang pada visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Kabupaten Bengkayang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saling ditopang oleh pemerintahan yang bersih dan terbuka”.

Misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan religius;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas amanah dan berwibawa yang berorientasi pada publik yang prima berbasis teknologi

komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mewujudkan kabupaten bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata;
5. Mewujudkan kabupaten bengkayang menjadi *smart* desa 2021-2026 dan kabupaten bengkayang lestari;
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal;
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

1.8 Letak Geografis Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0033'00" Lintang Utara sampai 1030'00" Lintang Utara dan 108039'0" Bujur Timur sampai 110010'00" Bujur Timur.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- [+] Utara : Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas
- [+] Selatan : Kabupaten Mempawah
- [+] Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang
- [+] Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Selanjutnya keadaan topografi dan sungai, ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

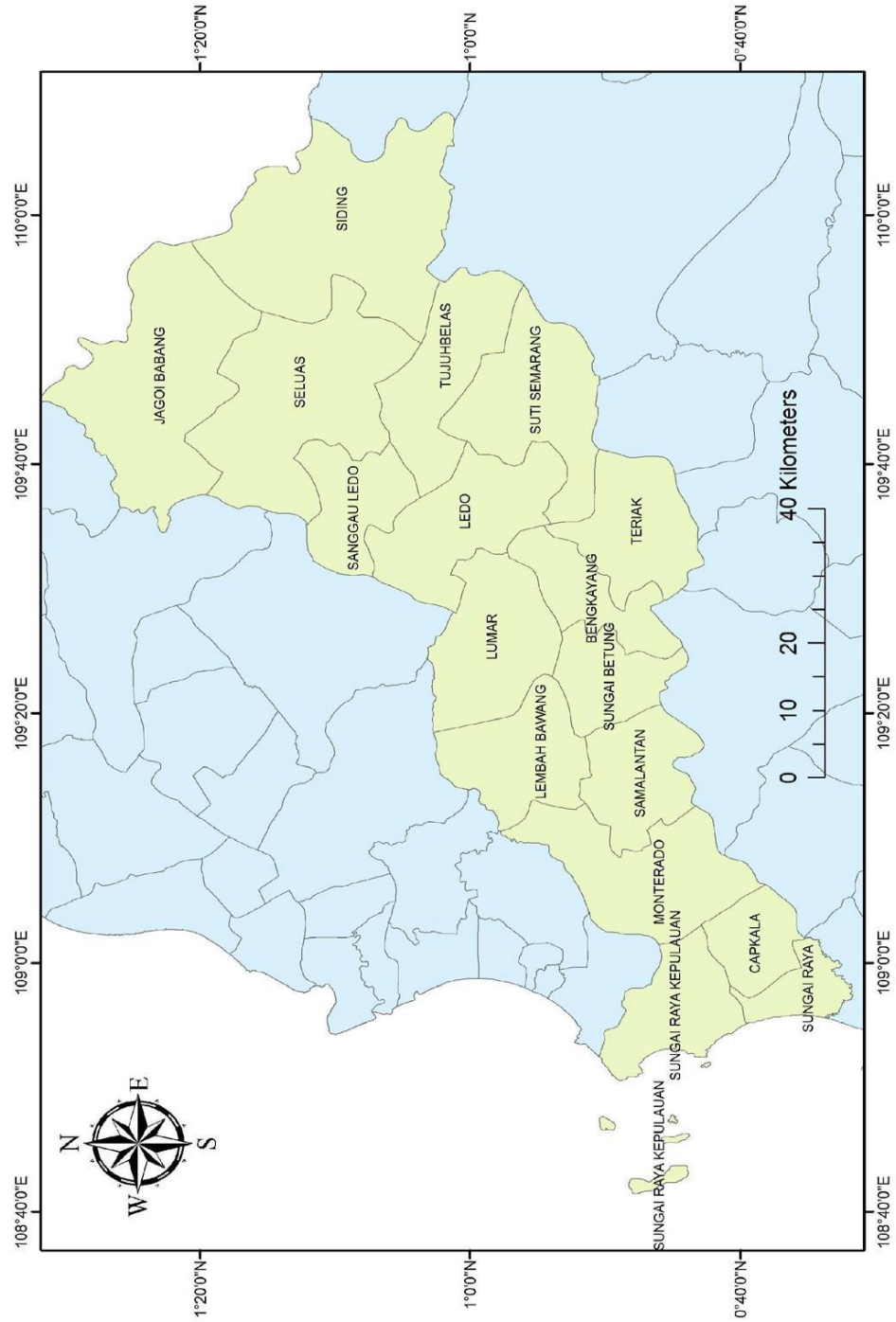
Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.382,74 km² atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655,02 km² atau sekitar 12,17 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan

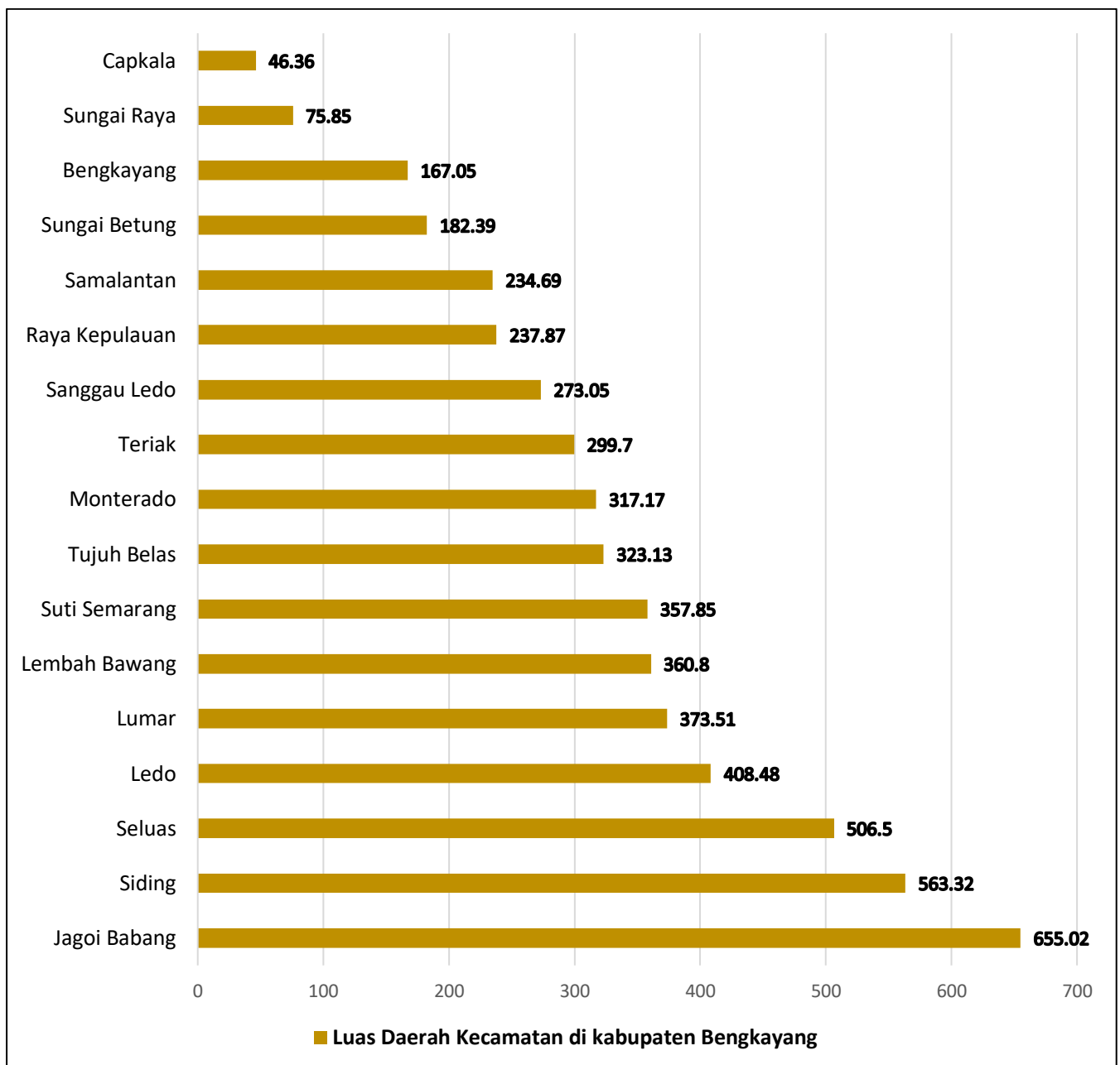
wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,36 km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Gambar 1.2 Luas Daerah Kecamatan (Km²) di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial

BAB II

KONTRUKSI GENDER

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi, dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya karena kodrat. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang, dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang, dan harmonis.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama, diantaranya:

- a. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai;
- b. Kelembagaan PUG yang bertanggung jawab;
- c. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG;
- d. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran;
- e. Gender Analisis;
- f. Data terpilah; dan
- g. Peran masyarakat.

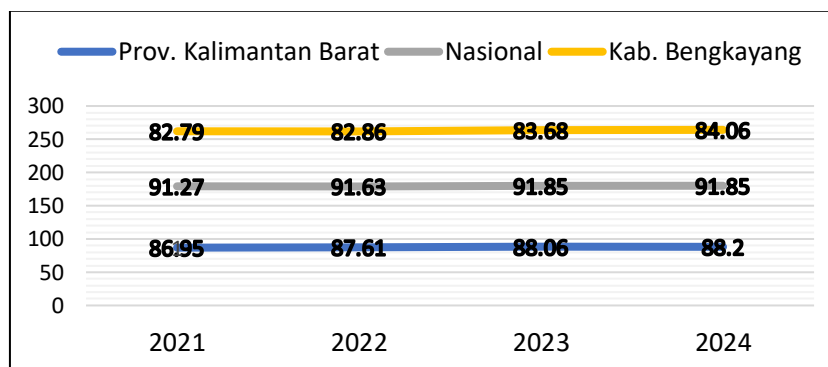
2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPG Kabupaten Bengkayang pada 4 tahun terakhir menunjukkan angka kenaikan, namun IPG masih jauh dibawah angka IPG Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Artinya masih perlunya upaya dan kesadaran dari semua pihak terkait kesetaraan gender di Kabupaten Bengkayang.

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024 (persen)



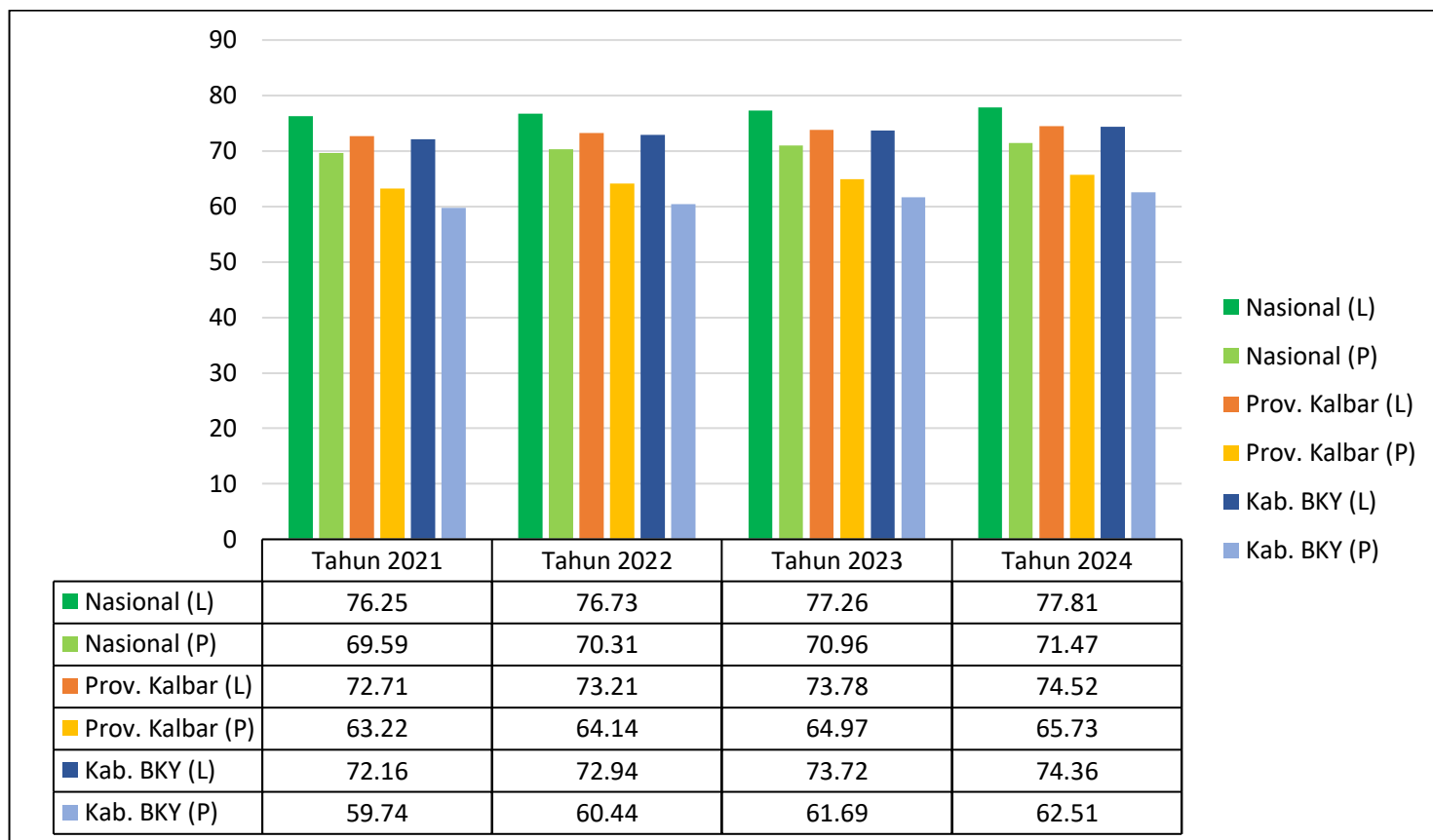
Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2021-2024

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Berikut 3 dimensi dasar yang membentuk IPM:

- (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- (ii) Pengetahuan (*knowledge*); dan
- (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Bengkayang 4 tahun terakhir dituangkan dalam grafik berikut:

**Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin (persen)
Nasional, Prov. Kalimantan Barat, dan Kab. Bengkayang, Tahun 2021-2024**



Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2021-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat nasional, provinsi Kalimantan Barat, maupun kabupaten Bengkayang menunjukkan capaian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, IPM di kabupaten Bengkayang masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan capaian provinsi Kalimantan Barat maupun nasional. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan layak, serta kesempatan ekonomi, sehingga capaian pembangunan mereka belum mampu menyamai laki-laki.

Oleh karena itu, pemaparan data gender menjadi krusial untuk mengevaluasi kondisi secara menyeluruh meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial-ekonomi, hingga politik guna mendorong terwujudnya kesetaraan gender, sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 5.

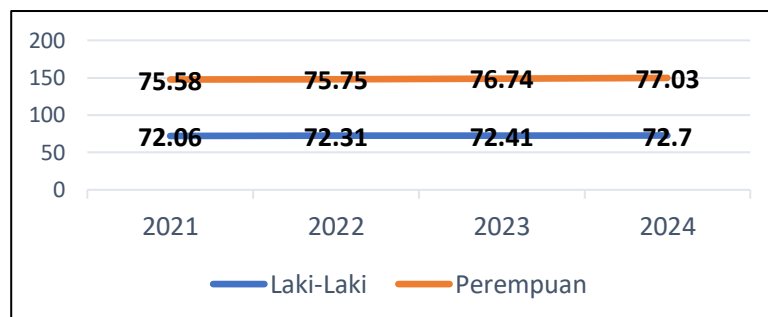
2.2 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup ialah perkiraan rata-rata lama hidup atau tahun yang dijalani seseorang sejak lahir. Angka AHH menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat, kesejahteraan, serta kualitas hidup suatu daerah atau wilayah. AHH bisa dikatakan sebagai

evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan penduduk dan derajat kesehatan penduduk. Sehingga dapat terus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi AHH, antara lain: status gizi dan kecukupan kalori, pola hidup sehat, pendidikan, program pengentasan kemiskinan, program kesehatan lingkungan, dan lainnya yang menyangkut kesehatan individu. Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur.

Grafik 2.3 Angka Harapan Hidup (persen) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

Pada grafik terlihat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi setiap tahunnya dibanding dengan laki-laki. Dilansir dari laman GoodStats, ada beberapa alasan angka harapan hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Secara biologis, tubuh wanita memiliki resistensi yang lebih baik terhadap beberapa penyakit dibandingkan pria. Wanita memiliki dua kromosom X, sedangkan pria memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Kromosom X membawa lebih banyak gen yang terlibat dalam perbaikan sel. Ketika sel tubuh mengalami kerusakan, wanita memiliki dua salinan gen ini, sehingga mereka lebih mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi.

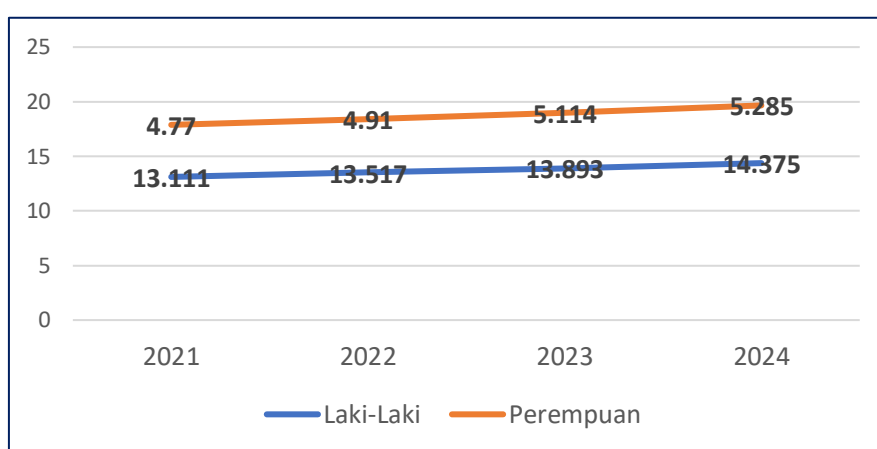
Gaya hidup juga mempengaruhi AHH pada gender. Laki-laki cenderung memiliki kebiasaan buruk yaitu merokok dan konsumsi alkohol dibanding perempuan. Perempuan juga lebih cenderung sadar kesehatan dengan rutin memeriksa kesehatan. Terlebih dorongan terkait kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang mengharuskan perempuan menjaga kesehatan bayi dan dirinya sendiri.

Peran gender dan sosial, laki-laki dianggap lebih kuat dibanding perempuan. Walaupun sudah ada kesetaraan gender dan perkembangan zaman, namun tetap saja tuntutan laki-laki dalam memenuhi ekonomi atau finansial keluarga masih diutamakan. Laki-laki cenderung mendapat kesempatan kerja yang lebih besar dibanding perempuan. Namun lebih banyak juga resiko yang terjadi akibat pekerjaannya. Baik secara fisik maupun psikologis.

2.3 Pengeluaran Per Kapita

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari besaran Pengeluaran Per Kapita, bila jumlah pengeluaran antara laki-laki dan perempuan tidak beda jauh, maka sudah terjadi kesetaraan gender di wilayah tersebut. Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa perempuan juga berpartisipasi dalam pembangunan bidang ekonomi. Tersedianya ketenagakerjaan pada perempuan, seperti jumlah tenaga profesional perempuan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Menandakan perempuan juga berhak untuk mandiri dan berkontribusi secara finansial sehingga dapat memperoleh kehidupan lebih baik.

**Grafik 2.4 Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin (persen)
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024**



Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

Grafik 2.4 menunjukkan jumlah pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin. Berdasarkan grafik terlihat bahwasanya pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi daripada pengeluaran per kapita perempuan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan laki-laki cenderung memiliki akses ekonomi lebih luas, pendapatan lebih tinggi, serta pola konsumsi yang lebih besar, sedangkan perempuan sering menghadapi keterbatasan struktural dan lebih banyak yang berada di usia lansia dengan pengeluaran rendah.

Adapun rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Bengkayang tahun 2024 adalah Rp 1.205.627,00 dengan persentase rata pengeluaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Berdasarkan Konsumsi Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Bengkayang Tahun, 2022-2024

Jenis Konsumsi	2022	2023	2024
Makanan	679.978,15	718.552,00	686.495,00
Bukan Makanan	593.136,80	628.861,00	519.131,00
Jumlah Pengeluaran	1.273.114,95	1.347.413,00	1.205.627,00

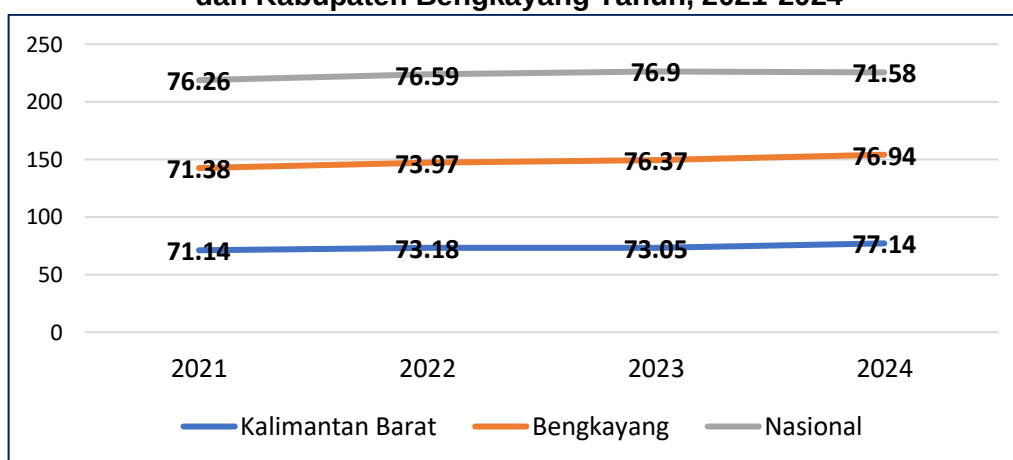
Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2022-2024

2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

Berdasarkan data statistik, IDG Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2021 cukup menggembirakan, karena dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang sudah bisa mengungguli, bahkan meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Bengkayang Tahun, 2021-2024



Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa IDG Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2024, dengan selisih angka kenaikan yang cukup. IDG Kabupaten Bengkayang cukup membanggakan karena angka IDG bisa sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun masih belum bisa mengungguli tingkat Nasional. Namun kabupaten bengkayang selama 4 (empat) tahun mengalami kenaikan yang stabil, itu menandakan upaya pemberdayaan gender pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama kepedulian masyarakat terwujud.

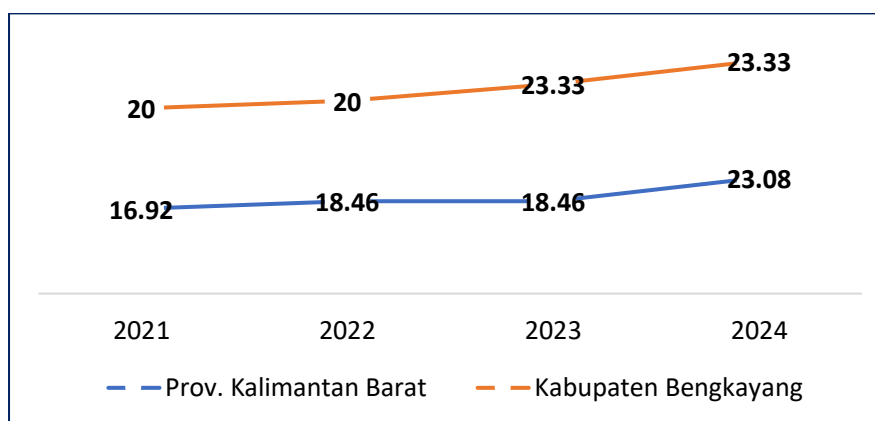
Pemaparan data perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender diatas diharapkan dapat mendorong motivasi khususnya Dinas Sosial PPPA sebagai penanggung jawab utama terkait pengarusutamaan gender dan hak anak. Tentunya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar mengkoordinir opd lain yang sama pentingnya seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Koperasi, dan bidang lainnya agar saling terbuka sehingga PUG dapat dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan.

2.5 Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Partisipasi pada bidang politik seperti pengurus partai politik, calon anggota DPRD, dan sebagainya minimal sekurang-kurangnya 30% harus ada keterwakilan perempuan. Hal ini berdasarkan pada UU Pemilu (UU No.7 Tahun 2017) pasal 245 menyebutkan bahwa daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Selain itu UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55 yang berisi tentang persyaratan bakal calon yang harus memiliki keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif. Hal ini memperkuat bahwa pemerintah mengusahakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik agar perempuan juga terlibat dalam pengambilan keputusan.

Grafik 2.6 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang Tahun, 2021-2024



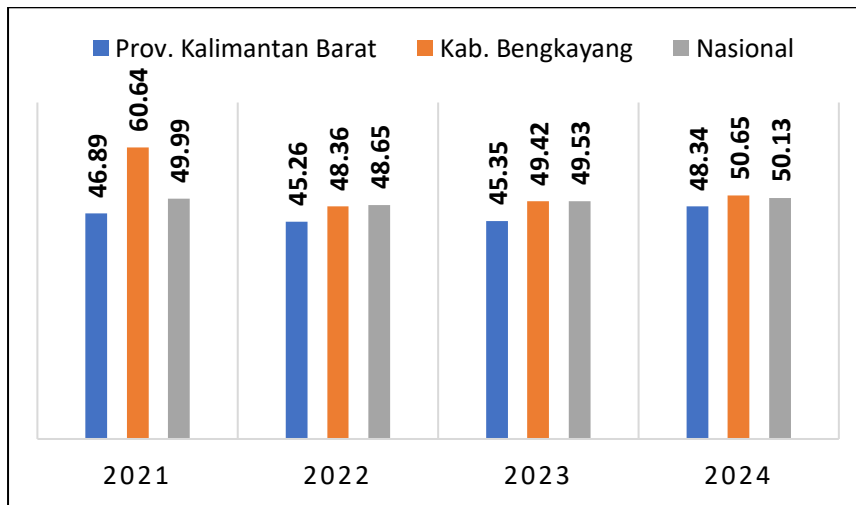
Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2021-2024

Keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen tentu bukan sekedar angka namun memberikan kebijakan yang adil dan pembangunan yang inklusif. Tentu saja proporsi partisipasi perempuan dalam parlemen merepresentasikan demokrasi yang sehat dan adil dan mencerminkan keragaman masyarakat terkait gender. Sehingga dapat mempercepat kesetaraan gender dalam berbagai aspek.

2.6 Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Tenaga profesional adalah individu yang memiliki keahlian khusus dan kompetensi di bidang tertentu. Keahlian tersebut didapatkan melalui pendidikan formal atau pelatihan khusus. Tidak hanya keahlian saja yang diperhatikan namun profesionalitas dalam menjaga nama baik profesi dengan bertanggung jawab terhadap kode etik dan wewenang yang diamanahkan.

Grafik 2.7 Presentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Nasional, Prov. Kalimantan Barat, dan Kab. Bengkayang, Tahun 2021-2024



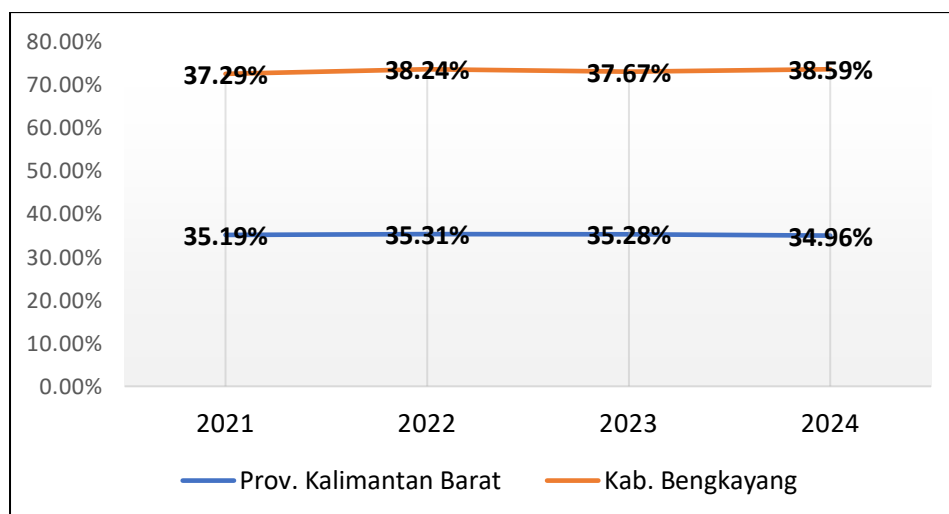
Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

Data diatas menunjukkan bahwa kabupaten Bengkayang sudah membantu emansipasi atau menghargai pemberdayaan perempuan dengan mempercayakan tenaga profesionalisme memiliki hak yang sama dengan tenaga ahli laki-laki. Perempuan bisa memperoleh pendidikan tinggi dan pelatihan khusus sesuai bidang yang ditekuni, memiliki jenjang karir yang baik hingga menjadi tenaga profesional.

2.7 Sumbangan Pendapatan Perempuan

Salah satu indikator dari pemberdayaan gender IDG ialah perempuan terlibat dalam perekonomian. Sumbangan pendapatan perempuan mencerminkan hak atas kemandirian ekonomi dan peran strategis dalam pembangunan.

Grafik 2.8 Sumbangan Pendapatan Perempuan Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024



Sumber Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

2.8 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

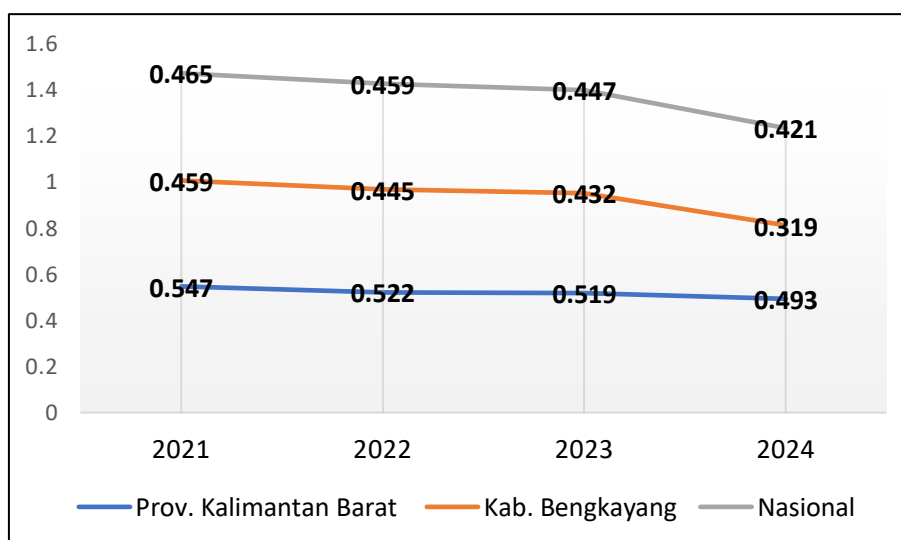
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran untuk mengukur tingkat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Terdapat 3 (tiga) dimensi dalam mengukur IKG yaitu 1) kesehatan produksi, 2) pemberdayaan, dan 3) pasar tenaga kerja.

Kesehatan reproduksi meliputi 2 indikator yaitu proporsi perempuan yang melahirkan tidak difasilitasi kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang melahirkan diusia muda atau dibawah 20 tahun (MHPK20). MTF mengukur presentase proses melahirkan tanpa bantuan tenaga medis atau kelayakan fasilitas kesehatan dibawah standar. Hal ini tentu beresiko pada kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya MHPK20 ialah presentase perempuan yang melahirkan dibawah usia 20 tahun yang tentu saja sangat beresiko. Oleh karena itu diharapkan angka indikator MTF dan MHPK20 di suatu daerah kecil.

Selanjutnya dimensi pemberdayaan dengan indikator pertama yaitu presentase perempuan sebagai anggota legislatif dan presentase tamatan SMA ke atas antara laki-laki dan perempuan. Bila ke dua indikator tinggi maka dapat dikatakan terjadi kesetaraan gender atau peran antara laki-laki dan perempuan yang adil.

Dimensi pasar tenaga kerja juga memegang peranan dalam mengukur IKG di setiap provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antar gender laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Grafik 2.9 Indeks ketimpangan Gender (IKG) Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

Nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Grafik diatas menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan IKG ditunjukkan dengan semakin kecil angka ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.

BAB III

STRUKTUR KEPENDUDUKAN

Data kependudukan membantu pemerintah, lembaga, dan sektor swasta dalam memahami karakteristik penduduk, merencanakan program yang tepat sasaran, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

3.1 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk sebesar 303.422 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2024 tercatat sebesar 108, artinya terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dan Rasio
Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024**

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
Sungai Raya	12,687	11,841	24,528	107
Capkala	5,299	4,756	10,055	111
Sungai Raya Kepulauan	16,058	15,169	31,227	106
Samalantan	12,425	11,264	23,689	110
Monterado	18,813	17,115	35,928	110
Lembah Bawang	3,569	3,121	6,690	114
Bengkayang	18,488	17,622	36,110	105
Teriak	9,552	8,628	18,180	111
Sungai Betung	6,760	6,290	13,050	107
Ledo	7,712	7,220	14,932	107
Suti Semarang	3,302	2,974	6,276	111

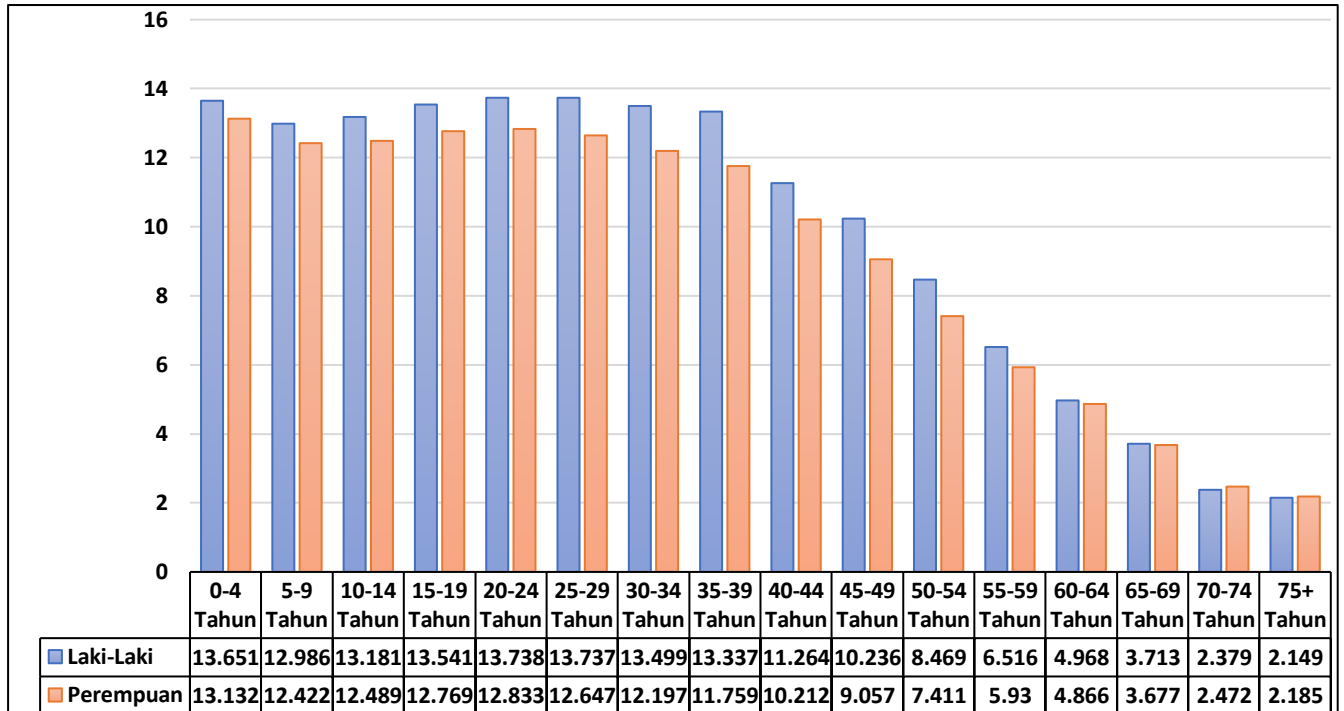
Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
Lumar	4,610	4,169	8,779	111
Sanggau Ledo	8,245	7,974	16,219	103
Tujuh Belas	8,352	7,925	16,277	105
Seluas	11,155	10,331	21,486	108
Jagoi Babang	5,880	5,542	11,422	106
Siding	4,457	4,117	8,574	108
Jumlah	157,364	146,058	303,422	108

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang

Selanjutnya bila jumlah penduduk dilihat menurut kelompok umur, diketahui data BPS Kabupaten Bengkayang tahun 2024, memiliki jumlah penduduk laki-laki terbanyak terdapat pada kelompok umur 20–24 tahun sebanyak 13.738 jiwa, disusul kelompok umur 25–29 tahun sebanyak 13.737 jiwa. Sementara itu, pada penduduk perempuan, kelompok umur terbanyak justru berada pada usia dini yaitu 0–4 tahun, kemudian pada usia 20–24 tahun sebanyak 12.833 jiwa, serta kelompok umur 15–19 tahun sebanyak 12.769 jiwa. Pada kelompok usia lanjut (lansia), jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki meskipun selisihnya relatif kecil.

Secara umum, struktur penduduk Kabupaten Bengkayang didominasi oleh usia produktif, yang mencerminkan adanya potensi bonus demografi apabila mampu dikelola dengan baik melalui pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu, tingginya jumlah anak perempuan pada kelompok umur 0–4 tahun mengingatkan pentingnya perhatian pada gizi anak serta pemberian ASI bagi bayi dan ibu hamil, agar kualitas generasi mendatang dapat lebih terjamin. Sementara itu, lebih tingginya jumlah lansia perempuan dibandingkan laki-laki mengindikasikan adanya perbedaan angka harapan hidup, di mana perempuan cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki.

Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

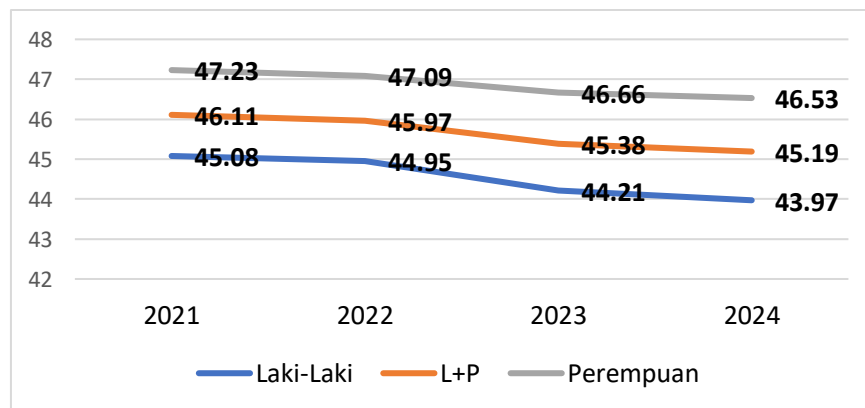


Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang

3. 2 Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan lansia) terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) dalam suatu populasi. Angka ini mengukur beban pemeliharaan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk menghidupi penduduk yang tidak produktif. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin kecil beban pada penduduk usia produktif, yang bisa berarti peluang untuk pembangunan yang lebih baik.

Grafik 3.2 Angka Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Angka ketergantungan kabupaten Bengkayang tahun 2024 tercatat sebesar 45,19%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia non-produktif. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka ketergantungan laki-laki sebesar 43,97%, sementara perempuan lebih tinggi yaitu 46,53%. Data ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk non-produktif pada perempuan relatif lebih besar dibandingkan laki-laki. Perempuan umumnya memiliki angka harapan hidup lebih tinggi, sehingga jumlah lansia perempuan (penduduk non-produktif) lebih banyak dibanding laki-laki.

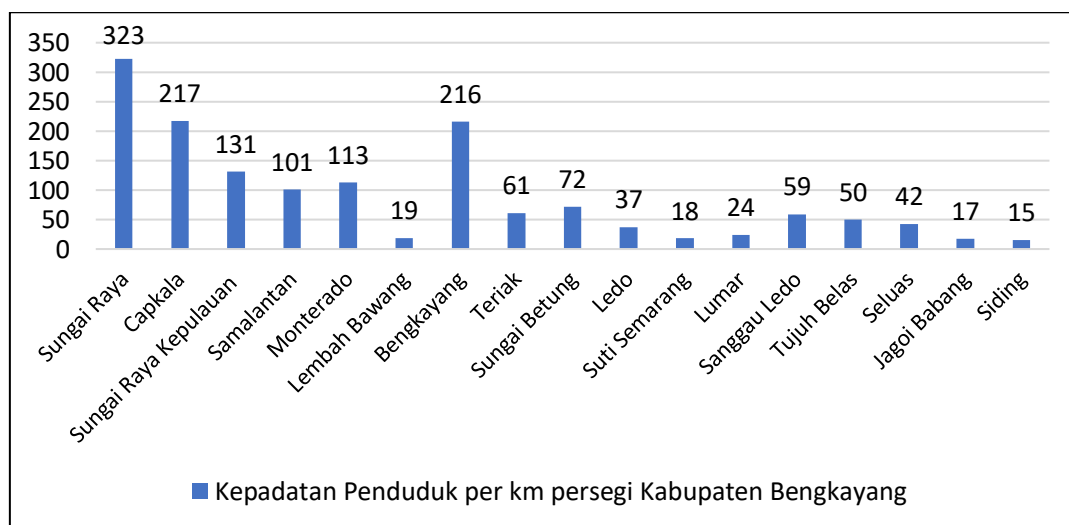
Kemudian bila dilihat selama periode 2021–2024 terjadi penurunan angka ketergantungan di Kabupaten Bengkayang yang menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia tidak produktif semakin berkurang. Kondisi ini menandakan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah, karena semakin banyak penduduk usia produktif yang berpeluang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Namun bila kelompok usia produktif banyak yang menganggur atau tidak memiliki pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja maka tidak akan memberi manfaat dan berubah menjadi beban bagi pembangunan. Oleh karena itu kualitas sdm pada kelompok produktif harus diperhatikan, khususnya ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

3.3 Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Grafik 3.3 Kepadatan Penduduk per Km² di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan data kepadatan penduduk yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bengkayang, terlihat adanya perbedaan distribusi penduduk yang cukup mencolok antar kecamatan. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sungai Raya dengan 323 jiwa per km², diikuti oleh Kecamatan Capkala (217 jiwa per km²) dan Kecamatan Bengkayang (216 jiwa per km²). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut menjadi pusat konsentrasi penduduk, kemungkinan besar karena faktor ketersediaan fasilitas, pusat ekonomi, atau lokasi yang lebih strategis.

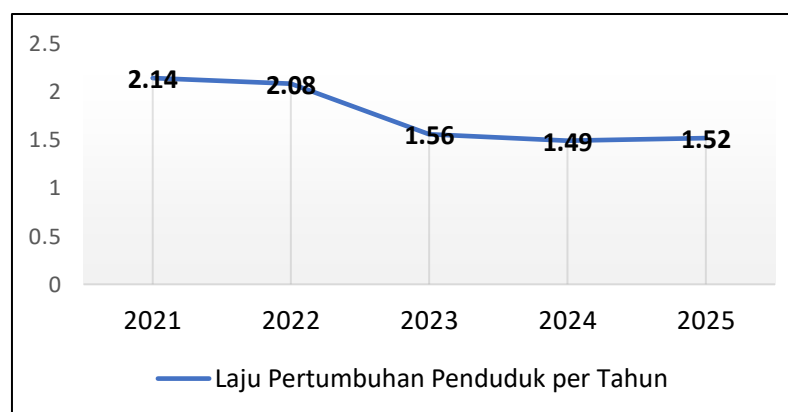
Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Siding dengan hanya 15 jiwa per km², disusul Kecamatan Jagoi Babang (17 jiwa per km²) dan Kecamatan Suti Semarang (18 jiwa per km²). Rendahnya kepadatan di wilayah ini dapat dikaitkan dengan luas wilayah yang besar, aksesibilitas terbatas, atau dominasi lahan untuk hutan dan pertanian.

Distribusi penduduk di Kabupaten Bengkayang tidak merata. Beberapa kecamatan menjadi pusat permukiman padat, sedangkan wilayah lain masih jarang penduduk. Hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengembangan wilayah potensial.

3.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan jumlah penduduk sebelumnya, yang dihitung berdasarkan kelahiran, kematian, dan migrasi (imigrasi dan emigrasi).

Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kabupaten Bengkayang



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2021 sampai dengan 2024, namun tahun 2025 kembali mengalami peningkatan walau dengan selisih 0,03% saja dari tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk harus ditekan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan

sumber daya, seperti pangan, lapangan kerja, dan lahan, guna mencegah kemiskinan, pengangguran, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur.

Oleh karena itu pentingnya upaya program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

3.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Status perkawinan dapat mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024

Status Perkawinan	2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Belum Kawin	41.09	29.12	42.52	31.30	41.17	30.58	42.31	32.65
Kawin	55.13	61.29	53.24	58.81	55.41	6.06	54.76	59.62
Cerai*	3.78	9.59	4.24	9.89	3.42	9.36	2.93	7.73
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, (SUSENAS) Kab. Bengkayang

*Catatan: cerai termasuk cerai hidup dan mati

3.6 Akta Kelahiran Anak

Hak Sipil Anak (HAS) adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut akte kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap warga negaranya.

Kepemilikan akta kelahiran adalah hak sipil anak terkait memperoleh identitas yang tercatat oleh negara yaitu pemberian suatu nama dan status kewarganegaraan. Nantinya menjadi syarat penting agar dapat mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran sering dipakai sebagai indikator pemenuhan hak anak dan pencatatan sipil.

Tabel 3.3 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Karakteristik di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Karakteristik	Memiliki Akta Kelahiran
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	91,39
Perempuan	92,38
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	87,90
40 persen Menengah	93,66
40 Persen Teratas	99,23
Pendidikan Tertinggi KRT	
SD ke bawah	94,01
SMP ke atas	89,53
Kabupaten Bengkayang	91,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS terlihat data tahun 2024 menunjukkan tingkat kepemilikan akta kelahiran penduduk berusia 0–17 tahun di Kabupaten Bengkayang memiliki capaian yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, terdapat perbedaan kecil antara jenis kelamin, di mana 91,39 persen anak laki-laki telah memiliki akta kelahiran, sedangkan 93,38 persen anak perempuan telah tercatat memiliki dokumen tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pencatatan sipil relatif merata antara anak laki-laki dan perempuan.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah, tingkat kepemilikan akta lahir tercatat sebesar 87,90 persen. Sementara itu, kelompok 40 persen menengah mencapai 93,66 persen, dan 40 persen teratas mencapai 99,23 persen.

Pola ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran atau kesejahteraan ekonomi rumah tangga, semakin besar pula peluang anak memiliki akta kelahiran. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemudahan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, serta kemampuan finansial untuk mengurus dokumen pendukung, seperti biaya transportasi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

BAB IV

BIDANG KESEHATAN

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus adil dan merata untuk semua golongan. Dalam hal kesetaraan gender maka pelayanan kesehatan harus sama terhadap laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan ibu dan anak diperhatikan agar melahirkan generasi yang sehat dan optimal sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam upaya kesetaraan gender untuk pembangunan berkelanjutan.

Kesejahteraan anak dimulai dari kecukupan gizi dalam kandungan. Dalam hal ini pemerintah bersama-sama mengupayakan kesehatan ibu dan anak seperti program pemberian tablet zat besi (Fe) secara gratis pada ibu hamil. Keberadaan posyandu dan puskesmas dengan tenaga bidan, ahli gizi, dan kader posyandu yang bertugas mengedukasi dan melayani ibu maternal mulai dari menjaga kesehatan kandungan hingga membantu proses melahirkan.

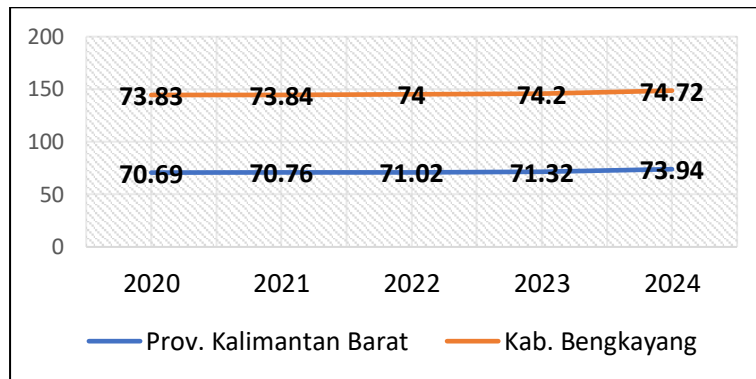
Selanjutnya kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup dan angka kematian ibu. Pengelompokan ibu hamil beresiko agar mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Seperti usia perkawinan pertama khususnya bagi pernikahan dini sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada perempuan.

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Meliputi status dan jenis pemakaian alat/ cara KB yang digunakan serta angka anak lahir hidup.

4.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut. Indikator angka harapan hidup dilihat dari angka rata-rata usia yang diharapkan akan tercapai oleh penduduk sejak lahir, misal Jika AHH di suatu daerah 74 tahun, artinya bayi yang lahir pada tahun tersebut diperkirakan akan hidup hingga rata-rata usia 74 tahun. Semakin tinggi angka AHH, artinya kualitas kesehatan penduduk semakin baik. Jadi fungsi AHH untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup juga sebagai sarana evaluasi pembangunan di bidang kesehatan terkait, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup sehat, gizi, pencegahan penyakit, dan taraf hidup.

Grafik 4.1 Angka Harapan Hidup Prov. Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020-2024



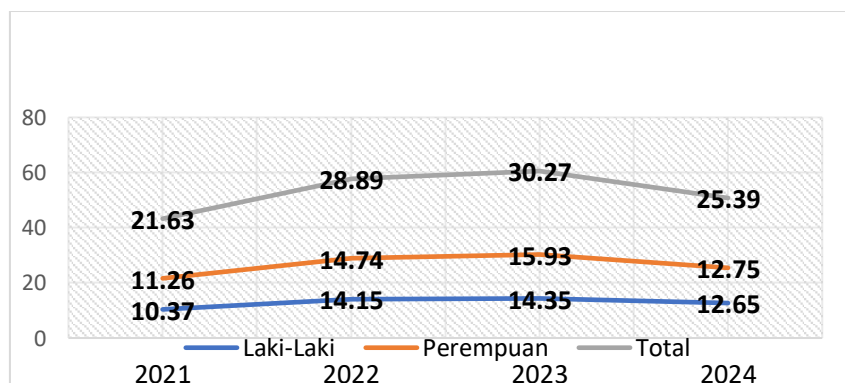
Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Angka harapan hidup Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan walaupun selisih angka kenaikan pada tahun 2020 ke 2021 hanya 0,01. Umur harapan hidup Kabupaten Bengkayang lebih unggul daripada Provinsi Kalimantan barat. Dengan adanya data ini diupayakan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat khususnya kabupaten Bengkayang bisa lebih baik dengan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat meningkat, dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

4.2 Angka Keluhan Sakit

Keluhan Sakit adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. Seseorang dikatakan sakit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari untuk bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

Grafik 4.2 Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kab. Bengkayang

Data keluhan sakit tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mengalami keluhan dibandingkan laki-laki. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor biologis seperti perubahan hormonal, menstruasi, kehamilan, hingga menopause, serta faktor sosial berupa beban ganda antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan luar yang meningkatkan risiko stres dan menurunkan daya tahan tubuh. Selain itu, perempuan juga cenderung lebih peka dalam merasakan gejala penyakit serta lebih terbuka dalam melaporkan keluhan dibanding laki-laki. Hal ini menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan perempuan, baik dari sisi pelayanan medis maupun dukungan sosial.

Oleh karena itu tingginya angka keluhan sakit pada perempuan menunjukkan pentingnya perhatian khusus pada aspek kesehatan perempuan, baik melalui layanan kesehatan reproduksi, pemantauan kesehatan mental, maupun peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang ramah gender.

Tabel 4.1 Kasus Penyakit di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Angka Penemuan TBC (persen)	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (persen)	HIV/AIDS Kasus baru Per 100.000 Penduduk	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk	Angka kesakitan DBD per 100.000 Penduduk
54,0	77,3	3	-	-	73,99

Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

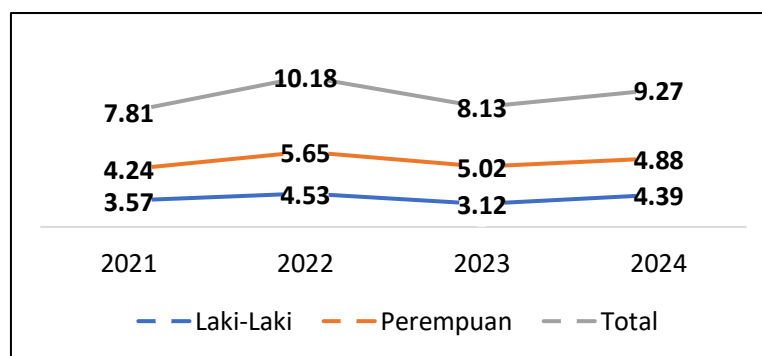
Pada tahun 2024, angka penemuan kasus TBC tercatat sebesar 54,0% dengan angka pengobatan mencapai 77,3%, kondisi ini wajar karena pengobatan mencakup pasien lama maupun baru yang menjalani terapi sehingga persentasenya dapat lebih tinggi dibanding penemuan kasus baru. Untuk HIV/AIDS, jumlah kasus baru tercatat sebanyak 3 per 100.000 penduduk, sedangkan penyakit kusta dan malaria tidak ditemukan adanya kasus baru. Sementara itu, angka kesakitan DBD masih cukup tinggi, yakni sebesar 73,99 per 100.000 penduduk. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa TBC masih menjadi perhatian utama dengan capaian pengobatan yang cukup baik, namun penemuan kasus perlu ditingkatkan. Di sisi lain, meskipun kasus HIV/AIDS relatif rendah dan kusta serta malaria tidak tercatat, tingginya kasus DBD menegaskan pentingnya penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di kabupaten Bengkayang.

4.3 Penduduk Rawat Jalan dan Rawat Inap

Angka rawat jalan adalah ukuran frekuensi atau jumlah layanan medis yang diberikan kepada pasien tanpa memerlukan rawat inap. Ini digunakan untuk mengukur aktivitas pelayanan kesehatan, seperti jumlah pasien yang berkonsultasi dengan dokter spesialis, menjalani tes diagnostik (laboratorium, rontgen, USG), atau menerima perawatan lain yang tidak mengharuskan mereka menginap di rumah sakit.

Data kesehatan, termasuk angka rawat jalan dan inap, penting untuk perencanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Informasi ini membantu pemerintah untuk memahami kebutuhan dan merencanakan program kesehatan yang sesuai.

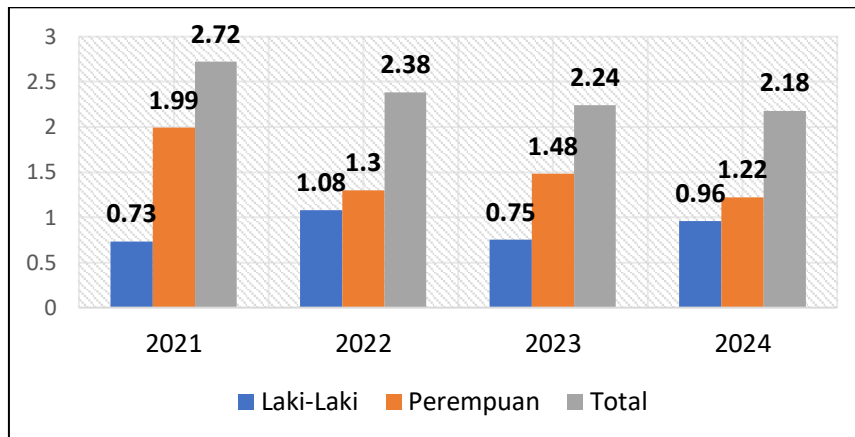
Grafik 4.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kab. Bengkayang

Berdasarkan data diatas, data penduduk di kabupaten Bengkayang yang melakukan pengobatan jalan dalam sebulan terakhir pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif sekaligus memperlihatkan bahwa perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pola ini mengindikasikan bahwa tingkat kunjungan pengobatan jalan penduduk tidak stabil, namun kecenderungan perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki dapat dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial, seperti kerentanan kesehatan reproduksi, beban ganda, serta kecenderungan perempuan lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kesadaran layanan kesehatan, terutama bagi laki-laki yang cenderung lebih rendah dalam memanfaatkan fasilitas pengobatan.

Grafik 4.4 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu, Tahun 2021-2024



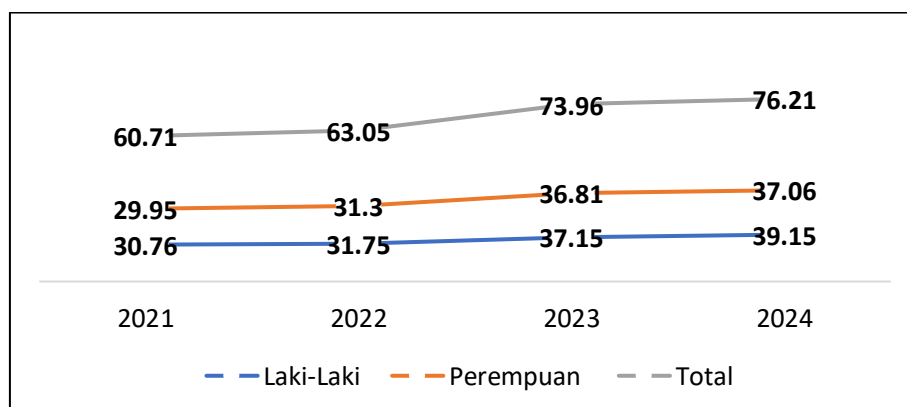
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kab. Bengkulu

4.4 Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan baik itu dari pemerintahan seperti BPJS, Jamkesda, maupun swasta memungkinkan penduduk untuk mengakses layanan kesehatan, mulai dari Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, serta obat-obatan, dengan iuran bulanan yang lebih ringan. Dengan terdaftar di jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya tinggi saat sakit dan dapat fokus pada pemulihan, serta mendapatkan perlindungan untuk masa depan. Oleh karena itu, kepemilikan kartu jaminan kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat perlindungan sosial masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kepemilikan kartu jaminan kesehatan dapat memberikan gambaran sejauh mana penduduk telah terjangkau oleh program perlindungan kesehatan nasional, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan jaminan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan akses layanan kesehatan di masyarakat.

Grafik 4.5 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu, Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kab. Bengkulu

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat di kabupaten Bengkayang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, persentase kepemilikan jaminan kesehatan tercatat 60,71% dengan komposisi laki-laki 30,76% dan perempuan 29,95%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 63,05% (laki-laki 31,75%, perempuan 31,30%). Tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga 73,96% (laki-laki 37,15%, perempuan 36,81%), dan pada 2024 mencapai 76,21% dengan kepemilikan laki-laki 39,15% serta perempuan 37,06%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa cakupan jaminan kesehatan semakin merata di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dengan selisih yang relatif kecil di antara keduanya.

4.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Ibu memiliki jasa yang besar dalam kehidupan dan berperan dalam mengelola rumah tangga, khususnya tentang kebutuhan dasar anak, serta kesehatan anggota keluarga. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus mendapat perhatian khusus. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memperhitungkan lama atau tempat kehamilan, yang disebabkan oleh kehamilan atau penanganannya, bukan karena kecelakaan atau sebab lain.

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil terutama peran suami dan keluarga dalam memastikan pelayanan kesehatan dan asupan gizi untuk ibu hamil tercukupi. Kematian ibu hamil terjadi lantaran indikasi yang lazim seperti pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain masalah kesehatan, banyak faktor yang mempengaruhi seperti latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan sekitar, dan kebijakan pemerintah. Rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan juga menjadi penentu AKI. Masalah lain seperti kesetaraan gender dan nilai budaya juga dapat mempengaruhi kesehatan maternal ibu baik fisik dan psikis.

Tabel 4.2 Jumlah dan Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2023

Jumlah			Eklamsia			Gangguan			Pendarahan			Partus Lama		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
13	11	4	0	0	0	1	0	0	6	5	1	-	-	-

Hipertensi Dalam			Infeksi			Aburtus			Lain-Lain		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
2	1	2	0	0	0	-	-	-	4	5	0

Sumber Buku Data Gender Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Bengkayang menunjukkan tren penurunan cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 13 kasus kematian ibu, menurun menjadi 11 kasus pada 2022, dan turun drastis menjadi hanya 4 kasus pada 2023. Penurunan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu, terutama terkait deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan.

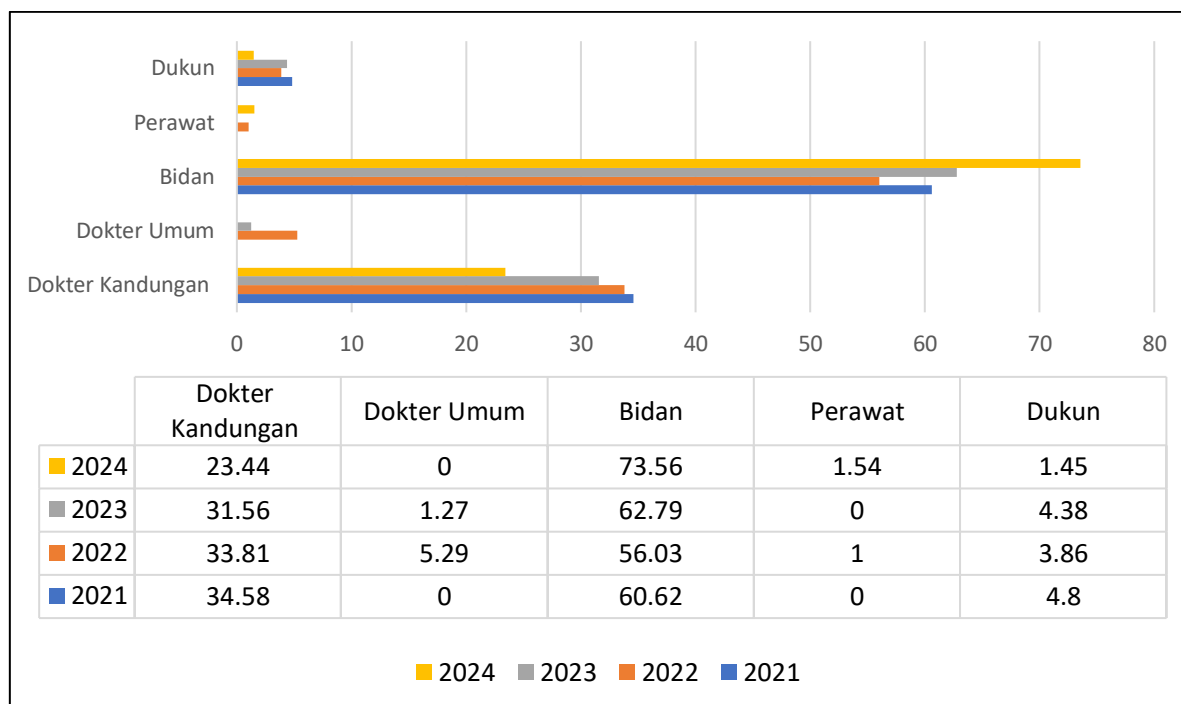
Jika dilihat menurut penyebab kematian, kasus pendarahan masih menjadi penyebab utama, meskipun jumlahnya cenderung menurun dari 6 kasus (2021), 5 kasus (2022), menjadi hanya 1 kasus (2023). Selanjutnya, kasus kematian akibat hipertensi dalam kehamilan tercatat 2 kasus pada 2021, 1 kasus pada 2022, dan meningkat cukup signifikan pada 2023 menjadi 3 kasus. Penyebab lain-lain menunjukkan pola fluktuatif, yaitu 4 kasus pada 2021, 5 kasus pada 2022, dan tidak ada kasus pada 2023. Sedangkan gangguan metabolik hanya muncul pada 2021 dengan 1 kasus, dan pada tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan lagi. Penyebab lain seperti eklamsia, partus lama, infeksi, maupun aburtus tercatat nihil sepanjang 2021–2023.

4.6 Pertolongan Persalinan dengan Kompetensi Kebidanan

Penolong persalinan ialah orang yang membantu seorang perempuan melahirkan. Untuk itu pemilihan penolong persalinan merupakan keputusan yang krusial karena dapat memengaruhi hasil persalinan serta kesehatan ibu dan bayi. Penolong persalinan berupa tenaga kesehatan terlatih seperti bidan atau dokter. Bidan dan dokter adalah penolong persalinan yang terlatih secara medis dan memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk menangani persalinan normal maupun komplikasi. Dukun bayi, anggota keluarga, atau teman juga dapat berperan sebagai penolong persalinan, terutama jika persalinan berlangsung normal dan tidak ada komplikasi. Agar persalinan berlangsung normal atau tidak ada komplikasi maka pentingnya penolong persalinan dalam menjamin kesehatan ibu dan anak.

Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini meliputi karakteristik ibu, riwayat pemeriksaan kehamilan, pengetahuan, sikap, persepsi biaya, riwayat penolong persalinan dalam keluarga, serta dukungan dari suami atau keluarga (Putri, 2016). Faktor ekonomi juga menentukan keputusan seorang ibu memilih penolong persalinan terkait pelayanan kesehatan terbaik. Rendahnya pendapatan keluarga, masyarakat yang tidak mempunyai uang yang cukup untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas (Agustina, Iriyanty, & Maryam, 2017). Penolong persalinan yang terampil sangat penting untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi, terutama dalam penanganan komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan karena secara tidak langsung kematian ibu juga terkait erat dengan penolong persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan berkontribusi terhadap menurunnya risiko kematian ibu dan bayi.

Grafik 4.6 Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Melahirkan 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Proses Melahirkan di Kabupaten Bengkayang, 2021-2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kab. Bengkayang

Berdasarkan data yang tersedia, penolong persalinan yang paling banyak dipilih adalah bidan. Persentase persalinan yang ditolong oleh bidan tercatat sebesar 60,62% pada tahun 2021, menurun menjadi 56,03% pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 62,79% pada tahun 2023, dan terus naik hingga mencapai 73,56% pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 4,59% pada tahun 2022, tren persentase ini menunjukkan peningkatan yang konsisten hingga tahun 2024.

Selain bidan, dokter kandungan juga merupakan penolong persalinan yang cukup banyak dipilih setiap tahunnya. Namun demikian, sebagian masyarakat masih ada yang memilih dukun beranak sebagai penolong persalinan, meskipun bukan merupakan tenaga medis resmi. Hal itu terjadi karena faktor geografis pada masyarakat desa yang masih tertinggal dalam infrastruktur seperti akses jalan yang sulit sehingga lebih memilih menggunakan jasa dukun yang mudah dijangkau serta sudah lama dipercaya masyarakat setempat.

4.7 Pemberian ASI Eksklusif Pada Baduta (Usia 0-23 Bulan)

UNICEF dan WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, dimulai dalam waktu satu jam setelah lahir. Melanjutkan pemberian ASI eksklusif – tanpa makanan lain – selama enam bulan pertama meningkatkan perkembangan sensorik dan kognitif serta melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Secara global,

penelitian menunjukkan bahwa bayi yang tidak disusui memiliki kemungkinan 14 kali lebih besar meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka, dibandingkan dengan mereka yang disusui secara eksklusif selama enam bulan pertama. Pemberian ASI yang optimal dapat menyelamatkan nyawa lebih dari 820.000 anak di bawah usia lima tahun setiap tahun dan mencegah 20.000 kasus kanker payudara pada wanita setiap tahunnya.

Oleh karena itu, data pemberian ASI menjadi sangat penting bagi pembangunan, terutama dalam aspek kesehatan perempuan. Dengan meningkatnya praktik menyusui, bukan hanya bayi yang memperoleh perlindungan kesehatan dan tumbuh lebih optimal, tetapi juga perempuan mendapatkan manfaat jangka panjang berupa penurunan risiko berbagai penyakit. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, produktivitas, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 0–23 Bulan (Baduta) Yang Pernah Diberi ASI dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI Menurut Karakteristik di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Karakteristik	Baduta (Usia 0-23)	Rata-Rata Lama
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	94,72	10,9
Perempuan	94,76	9,9
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	94,34	9,9
40 Persen Menengah	94,66	12,0
20 Persen Teratas	100,00	3,2
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD Ke Bawah	94,41	8,8
SMP Ke Atas	95,11	12,3
Kab. Bengkayang	94,74	10,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

Hampir seluruh baduta (usia 0-23 bulan) di Kabupaten Bengkayang, baik bayi laki-laki (94,72%) maupun bayi perempuan (94,76%), pernah memperoleh ASI. Namun, terdapat perbedaan rata-rata lama menyusui, di mana baduta laki-laki disusui lebih lama yaitu sekitar 10 bulan 27 hari dibandingkan dengan baduta perempuan yang rata-rata hanya 9 bulan 27 hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan pemberian ASI relatif merata antara jenis kelamin, durasi pemberian ASI masih sedikit lebih panjang pada anak laki-laki.

Rata-rata lama pemberian ASI lebih lama pada baduta laki-laki daripada perempuan dipengaruhi beberapa faktor. Persepsi orang tua yang menganggap bahwa anak laki-laki membutuhkan asupan lebih banyak dan lebih panjang daripada perempuan. Faktor sosial dan budaya dari masyarakat yang lebih memperhatikan anak laki-laki termasuk dalam hal

pemenuhan gizi. Selain itu kondisi ibu termasuk kesehatan, ibu yang bekerja, dan dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi banyaknya ASI. Terlihat bahwa masih ada kesenjangan gender pada pemenuhan gizi bayi oleh karena itu pemerintah harus lebih mengedukasi masyarakat terkait penguatan edukasi ASI. Tenaga kesehatan atau kader posyandu agar memantau keberlanjutan pemberian ASI. Kebijakan terhadap ibu menyusui yang bekerja juga harus diperhatikan, seperti penyediaan ruang menyusui, jam kerja fleksibel. Orang tua dan keluarga juga harus terbuka agar tidak membedakan pola pemberian ASI antara laki-laki dan perempuan.

4.8 Pelayanan Imunisasi Pada Balita (Usia 0-59 Bulan)

Program imunisasi merupakan suatu upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tertentu yang beresiko pada bayi. Imunisasi sebagai langkah untuk mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin pada seseorang sehingga tubuhnya resisten terhadap penyakit tertentu. Karena tubuh bayi masih rentan atau memiliki imunitas rendah sehingga harus segera mendapat perlindungan dari infeksi dan penyakit menular. Oleh karena itu tujuan pemberian imunisasi ialah membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus atau penyakit. Orang tua sudah seharusnya mengikuti program imunisasi sebagai upaya pencegahan virus dan penyakit berbahaya sejak dini.

Memiliki kartu imunisasi penting karena menjadi catatan resmi riwayat imunisasi anak, sehingga orang tua dan tenaga kesehatan dapat memantau kelengkapan vaksin sesuai usia. Dengan kartu ini, risiko anak tertinggal imunisasi dapat diminimalkan dan perlindungan kesehatan sejak dini lebih terjamin.

Tabel 4.4 Balita (Usia 0-59 Bulan) yang mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu Berobat/ Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi Menurut Karakteristik di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Karakteristik	Mempunyai Buku KIA/KMS
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	98,79
Perempuan	93,46
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	97,51
40 Persen Menengah	93,28
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT	
SD Ke Bawah	93,66
SMP Ke Atas	98,54
Kab. Bengkayang	96,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret, Kabupaten Bengkayang

*Catatan: Mempunyai buku KIA/KMS atau kartu berobat/ dokumen lain yang tertulis tanggal imunisasi, baik yang **dapat ditunjukkan** maupun **tidak dapat**.

Berdasarkan data diatas, kepemilikan buku KIA/KMS atau kartu imunisasi lebih tinggi pada anak laki-laki (98,76%) dibanding perempuan (93,46%). Selain itu, tingkat pendidikan kepala rumah tangga terbukti berpengaruh terhadap kesadaran pentingnya imunisasi, di mana kepemilikan kartu imunisasi pada keluarga dengan pendidikan SD ke bawah hanya sebesar 93,66%, lebih rendah dibandingkan dengan keluarga yang berpendidikan SMP ke atas sebesar 98,54%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua, semakin baik pula pemahaman dan kepedulian mereka terhadap pentingnya pencatatan imunisasi bagi anak.

Tabel 4. 5 Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) Menurut karakteristik dan Jenis Imunisasi yang Pernah Didapatkan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Karakteristik	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak-	Hepatitis
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	95,31	92,54	96,73	73,93	95,61
Perempuan	92,72	90,19	91,55	78,65	88,02
Kelompok Pengeluaran					
40 Persen Terbawah	93,97	91,56	96,16	75,92	93,70
40 Persen Menengah	92,92	89,90	89,90	73,96	89,90
20 Persen Teratas	98,21	95,68	100,00	85,96	90,28
Pendidikan Tertinggi KRT					
SD Ke Bawah	90,08	89,16	92,72	69,54	89,17
SMP Ke Atas	97,83	93,51	95,54	82,75	94,44
Kab. Bengkayang	94,03	91,37	94,16	76,27	91,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

Data menunjukkan balita (usia 0-59 bulan) yang pernah mendapatkan imunisasi lebih tinggi pada balita laki-laki dibanding perempuan. Hal ini sejalan dengan kecenderungan dalam pemberian ASI, di mana bayi laki-laki sering dianggap lebih membutuhkan perhatian dan gizi lebih. Namun, penting ditegaskan bahwa kebutuhan tumbuh kembang anak, termasuk imunisasi, sama pentingnya baik bagi bayi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam perhatian kesehatan anak perlu ditekankan, agar semua anak mendapatkan perlindungan dan hak yang sama untuk tumbuh sehat tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin.

4.9 Berat Badan Bayi Rendah

Berat badan bayi bukan hanya sekedar angka di timbangan, namun berat badan bayi mempengaruhi status gizi dan perkembangan fisik serta kognitif anak. Pemantauan berat badan bayi secara teratur sangat krusial untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal dan mendeteksi potensi masalah sejak dini. Jadi mengapa berat badan lahir bayi penting? Berat badan lahir bayi merupakan indikator kesehatan dan gizi awal bayi, serta prediktor risiko

masalah kesehatan jangka pendek dan panjang, termasuk gangguan pernapasan, infeksi, dan penyakit kronis seperti diabetes di masa dewasa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berat badan bayi saat lahir. Kesehatan ibu selama kehamilan harus diperhatikan terutama asupan gizi yang cukup. Konsumsi makanan bergizi dan cukup kalori selama masa kehamilan agar melahirkan bayi dengan berat badan sehat. Sebaliknya bila ibu kekurangan gizi atau memiliki penyakit yang tidak terkontrol selama kehamilan dapat menghambat pertumbuhan bayi. Oleh karena itu dukungan suami dan keluarga dalam mengutamakan kesehatan ibu harus diperhatikan.

Kelahiran tidak cukup bulan atau kelahiran bayi prematur (lahir sebelum usia 37 minggu) cenderung memiliki berat badan yang kurang atau lebih rendah daripada bayi yang lahir normal (cukup bulan). Bayi prematur tentu membutuhkan perhatian ekstra dalam memperoleh nutrisi yang cukup agar berat badan naik.

Tabel 4.6 Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Berat Badan dari ALH yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Karakteristik	<2,5 kg	≥2,5 kg	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	13,57	86,43	100,00
40 Persen Menengah	16,07	83,93	100,00
20 Persen Teratas	NA	84,61	100,00
Pendidikan Tertinggi			
SD Ke Bawah	NA	83,87	100,00
SMP Ke Atas	14,21	85,79	100,00
Kab. Bengkayang	14,64	85,36	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

Data menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran 40 persen terbawah justru memiliki proporsi bayi lahir dengan berat normal lebih tinggi dibandingkan kelompok menengah maupun atas. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pola konsumsi tradisional masyarakat berpenghasilan rendah yang masih mengandalkan pangan lokal bergizi, pemanfaatan program kesehatan ibu dan anak yang lebih rutin karena disubsidi pemerintah, serta adanya perubahan pola makan pada kelompok menengah ke atas yang cenderung mengonsumsi makanan instan atau kurang seimbang. Selain itu, ketidakiengkapan data pada kelompok 20 persen teratas juga dapat memengaruhi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi ibu hamil dan bayi baru lahir tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengeluaran, tetapi juga oleh perilaku kesehatan, akses layanan, dan pola konsumsi keluarga.

4.10 Angka Kematian Bayi

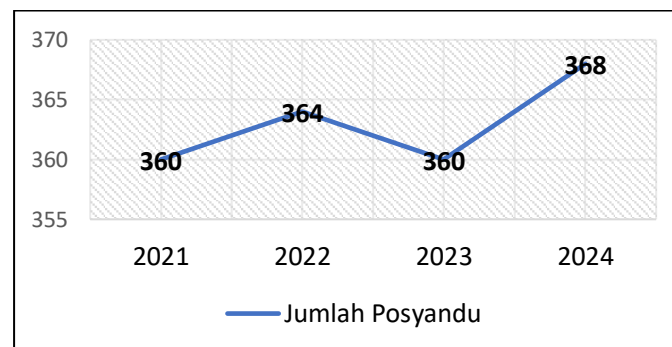
Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik prov. Kalimantan Barat memaparkan data Angka kematian bayi di Kabupaten Bengkayang tercatat sebanyak 16 kasus, sedangkan kematian balita (usia di bawah lima tahun) sebanyak 19 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kematian balita masih terjadi pada masa bayi. Angka kematian bayi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain status gizi ibu dan anak, berat badan lahir rendah, pemberian ASI, cakupan imunisasi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. Oleh karena itu, upaya peningkatan gizi, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan imunisasi dasar lengkap menjadi langkah penting untuk menekan angka kematian bayi dan balita.

4.11 Posyandu

Posyandu sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas kesehatan. Posyandu memiliki tujuan utama ialah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Khususnya upaya dalam menurunkan angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Posyandu berperan dalam pemeriksaan kehamilan bagi ibu, konseling persiapan persalinan dan ASI eksklusif, penimbangan bulanan untuk memantau pertumbuhan anak, pelayanan imunisasi lengkap, pelayanan keluarga berencana (KB), dan pelayanan lainnya terkait kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Grafik 4.7 Jumlah Posyandu di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat

Berdasarkan data jumlah posyandu di Kabupaten Bengkayang, terlihat adanya fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu 360 posyandu pada 2021, naik menjadi 364 pada 2022, sempat turun lagi menjadi 360 pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 368 pada 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa ketersediaan posyandu masih mengalami dinamika, namun secara umum ada tren peningkatan. Keberadaan posyandu sangat penting karena berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama melalui layanan seperti pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, penyuluhan gizi, serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Dengan jumlah posyandu yang cenderung bertambah, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar menjadi lebih merata, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan risiko kematian ibu dan anak serta peningkatan kualitas hidup keluarga.

4.12 Keluarga Berencana

Pemerintah mengadakan program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak agar meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama kesehatan ibu dan anak. Pemberian gizi sangat berpengaruh pada masa kehamilan, proses melahirkan, dan menyusui bagi ibu dan anak. KB membantu keluarga dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai kondisi ekonomi keluarga. Program KB juga bertujuan untuk menekan jumlah penduduk agar seimbang dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Tabel 4.7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat KB/Cara Tradisional untuk Menunda/Mencegah Kehamilan di Kabupaten Bengkayang, 2024

Karakteristik	Status Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional			
	Pernah Menggunakan	Sedang Menggunakan	Tidak Pernah Menggunakan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	23,77	62,09	14,14	100,00
40 Persen Menengah	22,94	57,18	19,88	100,00
20 Persen Teratas	18,51	46,67	34,82	100,00
Pendidikan Tertinggi				
SD Ke Bawah	25,06	57,35	17,59	100,00
SMP Ke Atas	20,72	57,05	22,23	100,00
Kab. Bengkayang	22,45	57,17	20,38	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret

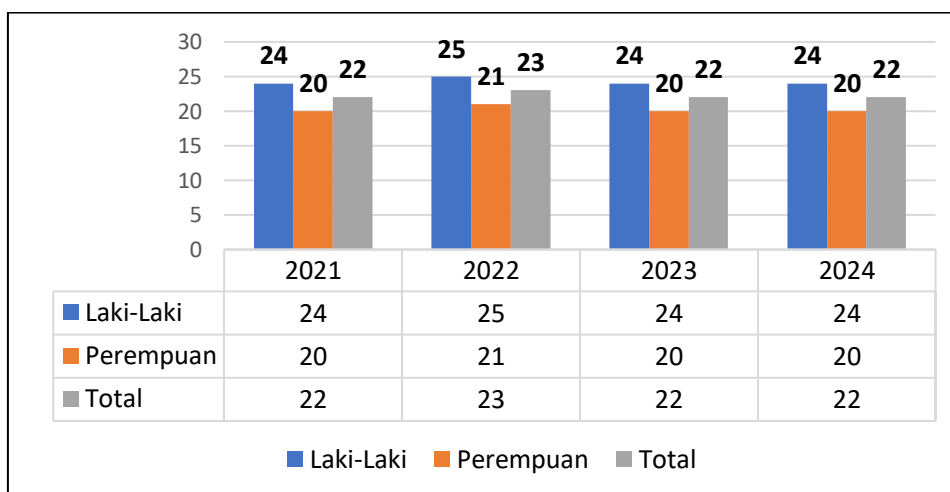
Berdasarkan data tahun 2024, terlihat bahwa penggunaan alat kontrasepsi atau cara tradisional lebih tinggi pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan persentase pengguna aktif sebesar 62,09%, dibandingkan kelompok menengah 57,18% dan kelompok

20 persen teratas 46,67%. Sebaliknya, proporsi yang tidak pernah menggunakan KB justru meningkat seiring dengan naiknya tingkat pengeluaran, yakni 14,14% pada kelompok terbawah, 19,88% pada menengah, dan mencapai 34,82% pada kelompok teratas. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dengan pengeluaran lebih rendah lebih cenderung memanfaatkan KB, kemungkinan karena faktor keterjangkauan, dukungan program pemerintah, serta kebutuhan untuk mengatur jumlah anak. Sementara pada kelompok berpengeluaran tinggi, lebih banyak yang tidak pernah menggunakan KB, yang dapat disebabkan oleh preferensi pribadi, perencanaan keluarga berbeda, atau akses terhadap pilihan lain di luar program KB pemerintah.

4.13 Usia Perkawinan Pertama (UKP)

Data usia perkawinan pertama digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan pernikahan dini. Selain itu data UKP juga dapat mengukur dan memantau tingkat fertilitas, karena usia perkawinan pertama berkorelasi negatif dengan jumlah anak yang dilahirkan, serta menilai kesiapan fisik dan mental calon pasangan.

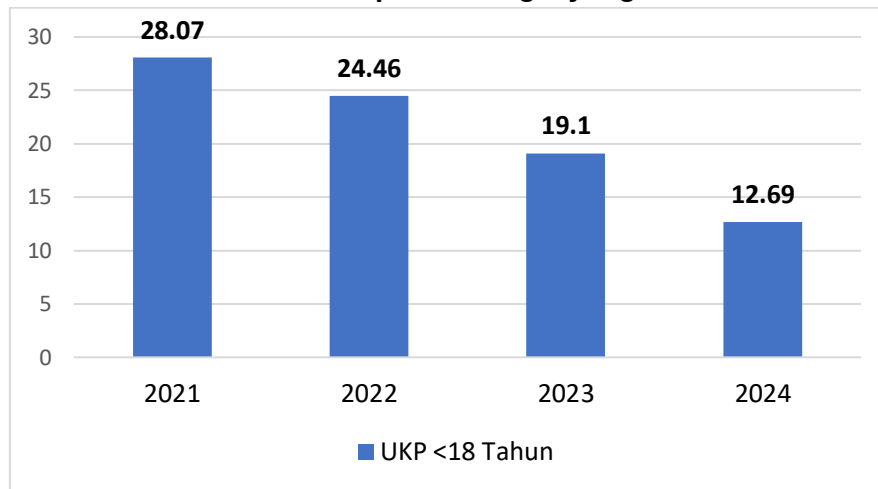
Grafik 4.8 Median Usia Kawin Pertama Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, di Kabupaten Bengkayang, 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang

Median usia kawin pertama pada penduduk usia 25–49 tahun menunjukkan pola yang konsisten di mana perempuan menikah pada usia lebih muda dibanding laki-laki. Tahun 2021 median UKP total tercatat 22 tahun (laki-laki 24 tahun, perempuan 20 tahun), sempat naik menjadi 23 tahun pada 2022 (laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun), namun kembali turun ke 22 tahun pada 2023 dan 2024, dengan pola sama yaitu laki-laki 24 tahun dan perempuan 20 tahun. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan usia menikah pertama sekitar 4 tahun antara laki-laki dan perempuan, serta menunjukkan bahwa usia perkawinan pertama perempuan masih relatif rendah.

Grafik 4.9 Perempuan 20–24 Tahun yang Kawin Pertama <18 Tahun di Kabupaten Bengkayang



Sumber: Badan Pusat Statistik (SUSENAS), Kab. Bengkayang

Pernikahan pada usia muda, khususnya di bawah 21 tahun, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Tubuh yang belum sepenuhnya matang meningkatkan risiko komplikasi saat kehamilan dan persalinan, seperti pendarahan, bayi lahir dengan berat badan rendah, hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan serta mempersempit peluang perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, peningkatan median usia kawin pertama perempuan menjadi penting sebagai upaya perlindungan kesehatan reproduksi sekaligus pemberdayaan perempuan.

BAB V

BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan tata perilaku lainnya untuk menunjang keberhasilan hidupnya dan melanjutkan eksistensinya. Semakin banyak ilmu pengetahuan dan keterampilan, maka semakin baik kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan bisa diperoleh secara formal maupun informal. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya tidak hanya cerdas namun memiliki kepribadian dan pengendalian diri yang baik. Tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri namun seseorang yang memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi akan berguna untuk masa depan masyarakat, bangsa, dan negara, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya pada perempuan dan anak. Semakin tinggi jenjang pendidikan atau keterampilan khusus yang dimiliki seorang perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Sehingga perempuan diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Anak-anak diharapkan minimal memperoleh pendidikan formal/sekolah 12 tahun atau hingga tamat SMA/SMK/MA/ sederajat. Laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses layanan pendidikan terutama pendidikan tinggi. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan adil merata.

Pada bab ini membahas peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), angka melek huruf, dan penduduk dengan pendidikan tertinggi.

5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah sebagai indikator untuk melihat akses penduduk terhadap pendidikan. APS adalah persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Karakteristik	Tidak/ Belum Pernah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Ke Atas	
Laki-Laki	NA	40,31	11,72	15,03	29,65
Perempuan	NA	37,69	14,69	17,65	24,36
Total	NA	39,03	13,17	16,03	27,07

Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS) Tahun 2024

Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 mencapai 99,12%. Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS anak laki-laki tercatat sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yang sebesar 98,13%. Pada kelompok usia 13–15 tahun, APS tercatat sebesar 94,22%, dengan partisipasi sekolah anak perempuan (97,23%) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (90,72%). Sementara itu, pada kelompok usia 16–18 tahun, APS mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 74,14%. Jika dirinci menurut jenis kelamin, APS anak perempuan (78,94%) kembali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (69,95%).

Secara umum, APS di Kabupaten Bengkayang tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) telah bersekolah. Namun, pada kelompok usia yang lebih tinggi (13–15 tahun dan 16–18 tahun), angka partisipasi mengalami penurunan. Selain itu, pada tahun 2024 anak perempuan memiliki APS lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, terutama pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan mulai memperoleh perhatian yang semakin besar, meskipun tantangan partisipasi pada usia remaja masih perlu mendapat perhatian.

Hal ini bisa disebabkan karena semakin bertambah umur keinginan penduduk laki-laki Kabupaten Bengkayang untuk bersekolah semakin berkurang yang bisa disebabkan karena kondisi sosial ekonomi dari penduduk di kabupaten Bengkayang seperti dikarenakan bekerja, menikah muda atau memang tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah kabupaten Bengkayang sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di kabupaten Bengkayang.

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024

Jenis Kelamin	2021			2022			2023			2024		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
Laki-Laki	99.44	93.72	68.05	99.25	92.47	62.94	99.53	96.52	66.35	100	90.72	69.95
Perempuan	97.26	95.44	80.69	99.15	96.70	72.55	95.98	96.72	80.25	98.13	97.23	78.94
Total	98.36	94.63	74.29	99.20	94.66	67.68	97.61	96.62	73.88	99.12	94.22	74.14

Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS)

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2024

Jenis Kelamin	2021			2022			2023			2024		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Laki-Laki	99.44	97.26	98.36	99.04	58.33	47.71	99.53	66.14	55.69	100	69.78	57.84
Perempuan	55.49	67.41	61.8	95.69	65.44	54.02	95.98	63.84	59.41	97.05	68.15	65.45
Total	44.89	56.02	50.38	97.24	61.41	50.55	97.61	65.01	57.7	98.62	68.9	61.39

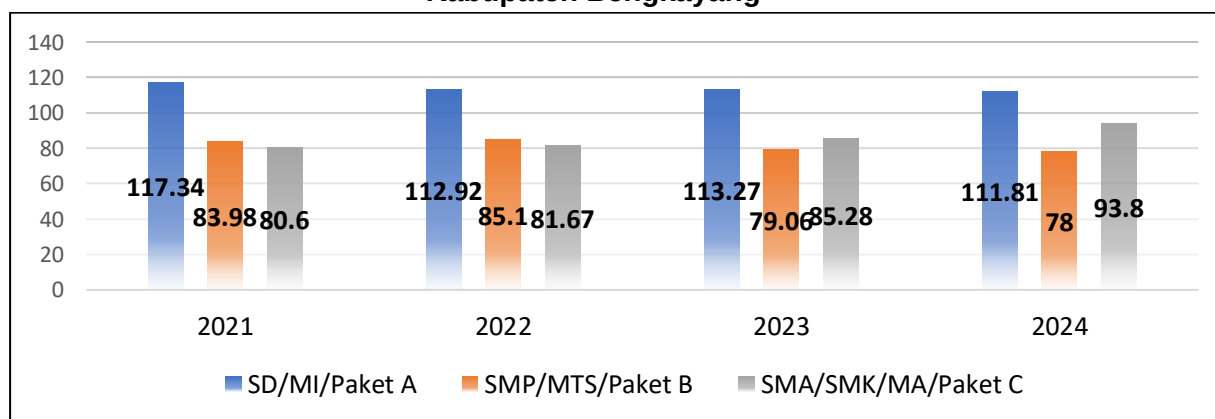
Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS)

5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Mengacu pada jenjang pendidikan yang ada, APK dibagi menjadi APK SD, APK SMP, APK SMA, dan APK Perguruan Tinggi. Tingkat APK yang tinggi mengartikan bahwa banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Grafik 5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang



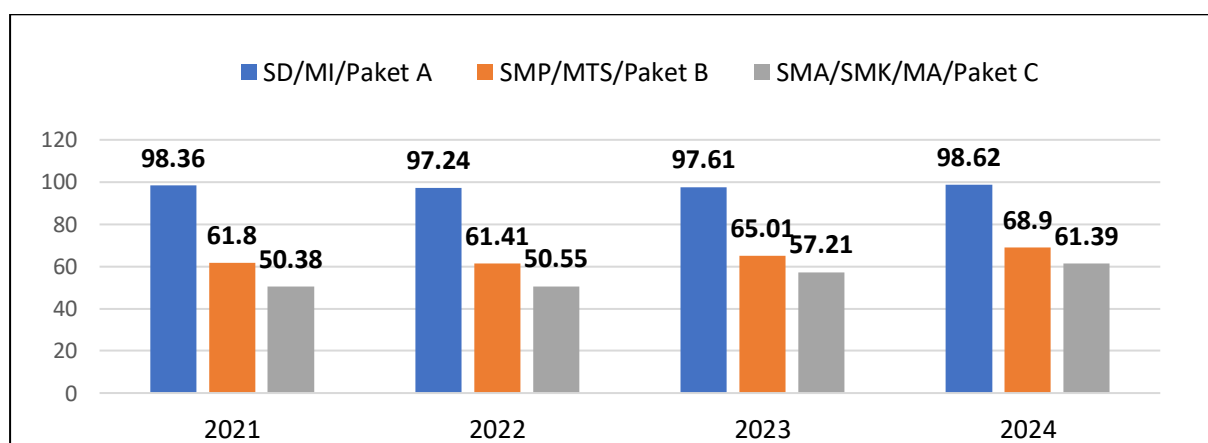
Sumber Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. APM dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur tersebut, dengan total jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

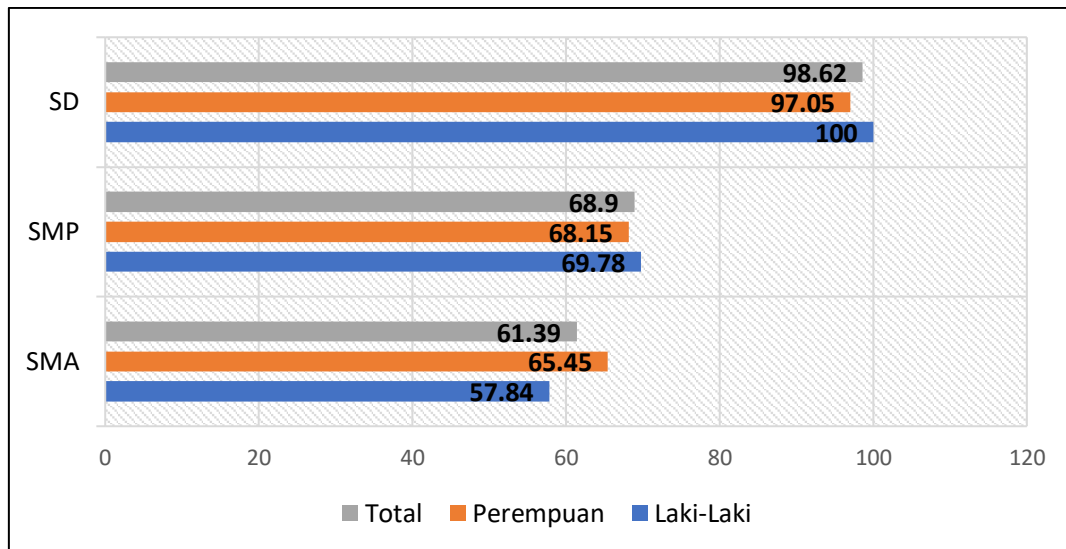
Grafik 5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2021-2024 di kabupaten Bengkayang, presentase APM tingkat pendidikan SMP/MTS/Paket B, terlebih SMA/SMK/MA/Paket C masih rendah atau belum mencapai target presentase 95%. Secara ideal, APM seharusnya mencapai 100% karena seluruh anak usia sekolah sesuai jenjangnya bersekolah. Namun, dalam praktiknya sulit mencapai angka tersebut akibat adanya berbagai faktor seperti anak yang putus sekolah, kondisi kesehatan, hambatan geografis, serta faktor sosial-ekonomi keluarga. Oleh karena itu, batas capaian minimal yang dianggap baik adalah 95%, karena angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah telah mengenyam pendidikan pada jenjang yang sesuai.

**Grafik 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024**



Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS) Tahun 2024

Berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat SD dan SMP pada penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk Perempuan. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA partisipasi penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk perempuan sebesar 65,45 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang sebesar 57,84 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa minat dan keinginan sekolah penduduk perempuan di tingkat SMA lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini bisa saja disebabkan karena penduduk laki-laki ada kecenderungan untuk memilih bekerja dan mencari uang dibandingkan bersekolah sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah di tingkat SMA.

Masih tingginya partisipasi sekolah hanya di tingkat SD baik dari indikator APS dan APM menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kabupaten Bengkayang tergolong masih rendah. Hal ini juga ditunjukkan dengan indikator rata-rata lama sekolah (means years of schooling) kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang hanya berkisar pada kisaran 6-7 tahun yang berarti bahwa rata-rata pendidikan masyarakat kabupaten Bengkayang tamat SMP kelas 1. Hal ini masih jauh dari harapan lama sekolah (expected years of schooling) yang ingin dicapai yaitu selama kisaran 12 tahun dalam kurun waktu 5 tahun yang berarti sampai jenjang pendidikan SMA.

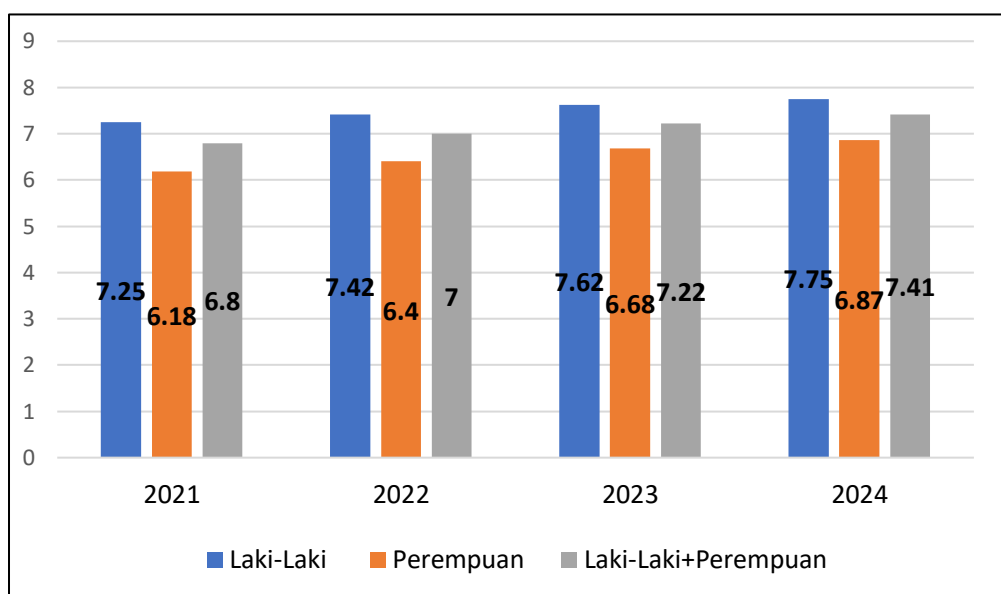
5.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu

wilayah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat, yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angka putus sekolah, kemampuan ekonomi, lingkungan, dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan.

Berikut adalah data RLS menurut jenis kelamin selama 4 tahun terakhir di kabupaten Bengkayang:

Grafik 5.4 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang



Sumber Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat

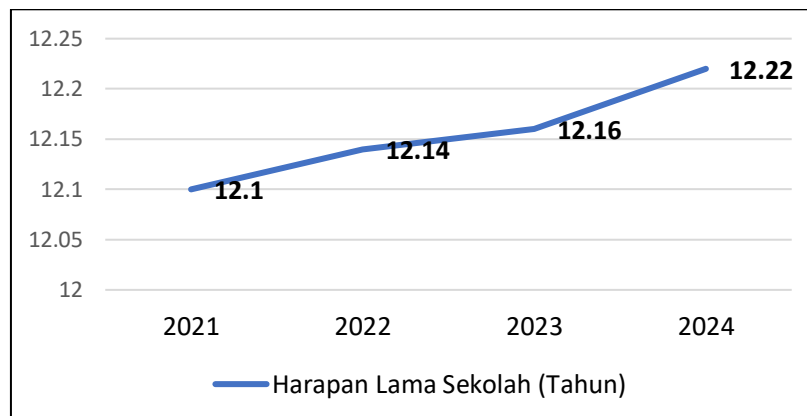
Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten Bengkayang hanya setara tamat SD dan belum menyelesaikan jenjang SMP. Laki-laki rata-rata mencapai awal kelas 2 SMP, sedangkan perempuan rata-rata hanya sedikit melanjutkan pendidikan setelah SD. Meskipun setiap tahun angka RLS naik, namun penduduk kabupaten Bengkayang hanya bisa menyelesaikan 6 tahun pendidikan atau hanya tamat SD. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum penduduk belum menuntaskan program wajib belajar 12 tahun.

5.5 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) adalah perkiraan berapa lama seorang anak akan bersekolah, dihitung berdasarkan tingkat pendidikan yang sedang berjalan. HLS mengukur berapa tahun seorang anak, pada usia tertentu, diperkirakan akan bersekolah di masa depan. Misalnya, jika HLS suatu daerah adalah 12 tahun, ini berarti siswa-siswa di daerah tersebut diperkirakan akan bersekolah hingga setara dengan tamat SMA.

Harapan lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah akses layanan kesehatan, kualitas lingkungan, gaya hidup dan pola makan, faktor sosial dan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Grafik 5.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bengkayang**



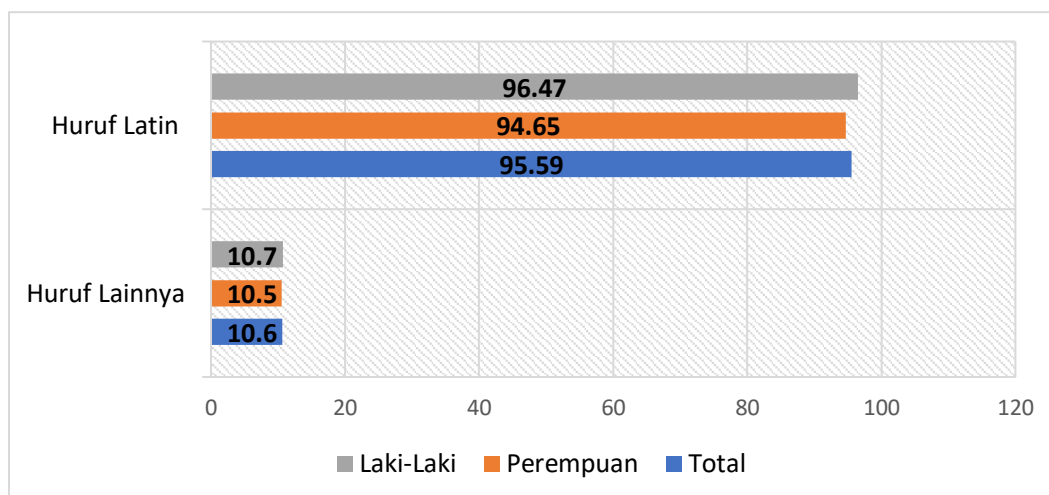
Sumber Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Barat

HLS adalah ukuran teoritis yang menunjukkan berapa lama seseorang diharapkan dapat bersekolah. HLS dihitung berdasarkan data penduduk usia 7 tahun ke atas dan melihat tren pendidikan di suatu wilayah atau negara. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) cenderung lebih tinggi karena mengasumsikan bahwa semua anak akan bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang benar-benar dihabiskan seseorang untuk bersekolah. Angka ini dihitung berdasarkan data penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Karena ada kemungkinan seseorang tidak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tertinggi, atau ada juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka RLS cenderung lebih rendah dibandingkan dengan HLS.

5.6 Angka Melek Huruf

Kegiatan membaca merupakan pintu utama untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih keterampilan berpikir kritis, sehingga bisa menjadi masyarakat madani. Kemampuan baca-tulis sangat penting dalam pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk mewujudkan tujuan hidup. Mulai dari proses mendapat pengetahuan baru, menggali potensi hingga berkontribusi dalam pembangunan. Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. Penduduk usia 15 tahun ke atas dianggap sudah dewasa dan memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, atau huruf lainnya. Oleh karena itu proporsi AMH dilakukan pada penduduk usia 15 tahun keatas.

Grafik 5.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS) Tahun 2024

Kemampuan membaca dan menulis huruf latin di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024 sebesar 95,59 persen, hal ini berarti sekitar 95 persen penduduk di Kabupaten Bengkayang yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin. Sedangkan yang bisa membaca huruf lainnya ada sebanyak 10,6 persen.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui juga bahwa di Kabupaten Bengkayang masih ada penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca huruf latin. Kondisi tersebut disebabkan penduduk usia 15 tahun ke atas hanya bisa membaca huruf lainnya dan biasanya dialami oleh penduduk-penduduk usia tua yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan hanya belajar huruf/tulisan Arab atau huruf/tulisan Cina yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya berkaitan dengan partisipasi sekolah di kabupaten Bengkayang.

Tabel 5.4 Presentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024

Jenis Kelamin	2021		2022		2023		2024	
	Huruf Latin	Huruf Lain	Huruf Latin	Huruf Lain	Huruf Latin	Huruf Lain	Huruf Latin	Huruf Lain
Laki-Laki	94.66	7.21	95.17	10.8	96.91	15.2	96.47	10.7
Perempuan	91.06	6.42	92.67	11.74	94	16.5	94.65	10.5
Total	92.93	6.83	93.98	11.25	95.5	15.83	95.59	10.6

Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS)

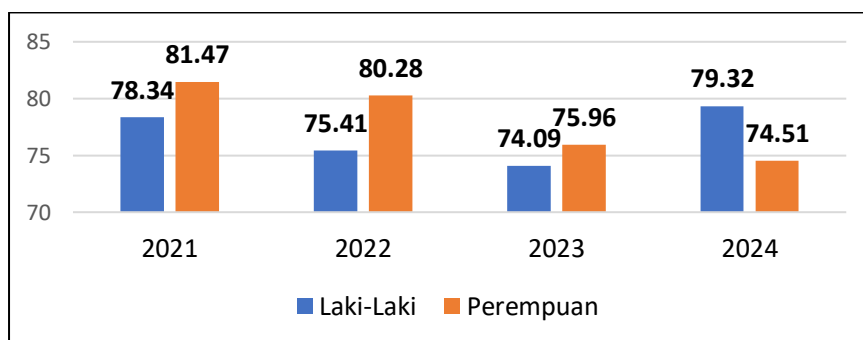
5.7 Akses Teknologi dan Penggunaan Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Bengkayang. Akses terhadap perangkat elektronik seperti telepon genggam, komputer, maupun televisi, serta ketersediaan jaringan internet, menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat literasi digital masyarakat. Pemanfaatan teknologi tidak hanya sebatas pada komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam berbagai bidang.

Dalam bidang pendidikan, akses internet memungkinkan siswa dan mahasiswa memperoleh sumber belajar yang lebih luas, mengikuti pembelajaran daring, hingga meningkatkan keterampilan digital yang dibutuhkan di era modern. Pada bidang ekonomi, teknologi informasi mendukung tumbuhnya usaha berbasis digital, mempermudah akses pasar, dan meningkatkan efisiensi aktivitas perdagangan. Selain itu, akses elektronik juga berperan dalam bidang sosial, kesehatan, maupun pemerintahan, misalnya melalui layanan publik berbasis aplikasi, *telemedicine*, serta media informasi masyarakat.

Dengan demikian, data kepemilikan elektronik dan akses internet masyarakat dapat memberikan gambaran sejauh mana kesiapan masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, sekaligus menjadi dasar kebijakan dalam memperkuat literasi digital dan pemerataan akses informasi. Selain itu, penting pula memperhatikan aspek kesetaraan gender, karena perempuan seringkali memiliki keterbatasan dalam akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dibandingkan laki-laki. Upaya untuk memperluas akses TIK secara merata bagi kedua jenis kelamin menjadi kunci agar pemanfaatan teknologi benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang inklusif.

Grafik 5.7 Persentase Penggunaan TI Penduduk 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Nasional (SUSENAS), Kab. Bengkayang

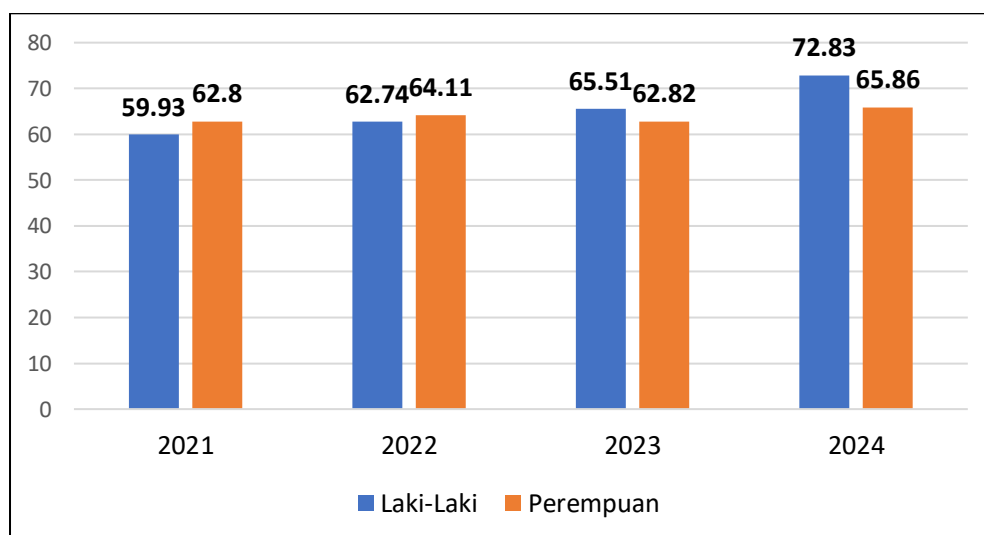
Penggunaan TI yang dimaksud pada data diatas berupa telepon genggam (*HP/ smart phone*)/ nirkabel atau komputer (*PC/ desktop, laptop/ notebook, tablet*). Penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Bengkayang pada periode 2021–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Persentase pengguna meningkat pada 2021 dan 2022, sempat menurun pada

2023, lalu kembali naik pada 2024, meskipun capaian 2024 masih berada di bawah persentase tahun 2021 dan 2022.

Secara umum, penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas lebih banyak menggunakan TI dibanding laki-laki, terutama pada tahun 2021–2023. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga karena perempuan maupun anak perempuan lebih aktif memanfaatkan TI untuk aktivitas sosial, hiburan, komunikasi, serta pendidikan. Namun, pada 2024 terjadi pergeseran, di mana laki-laki mencatat persentase penggunaan TI lebih tinggi (79,32%) dibanding perempuan (74,51%).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggunaan TI tidak semata ditentukan oleh tingkat pengeluaran atau pekerjaan, tetapi juga oleh kebiasaan, kebutuhan pendidikan, dan aktivitas sehari-hari. Tingginya penggunaan TI pada perempuan di periode sebelumnya menandakan bahwa teknologi telah menjadi sarana penting bagi seluruh kelompok usia, baik untuk mendukung pendidikan anak, interaksi sosial, maupun hiburan di rumah tangga.

Grafik 5.8 Akses Internet (persen) Penduduk 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Nasional (SUSENAS), Kab. Bengkayang

Penggunaan internet di Kabupaten Bengkayang menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan semakin besarnya peran teknologi dalam kehidupan masyarakat. Pada periode awal, penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas cenderung lebih banyak mengakses internet dibanding laki-laki, mencerminkan pemanfaatannya yang luas tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi juga pendidikan, komunikasi, dan hiburan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi pergeseran di mana laki-laki sedikit lebih unggul dalam akses internet, meskipun selisihnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama aktif memanfaatkan internet, dan kesenjangan gender dalam akses semakin mengecil.

Namun demikian, penggunaan internet pada perempuan diharapkan tidak hanya terbatas pada hiburan atau media sosial, melainkan juga diarahkan untuk pengembangan diri, penambahan wawasan, serta pemberdayaan agar perempuan dapat lebih mandiri dan berdaya. Upaya pemerintah dapat berupa pelatihan keterampilan digital, seperti digital *marketing* untuk memperluas pemasaran produk UMKM, maupun penguasaan aplikasi perkantoran (*office*) yang mendukung peluang pekerjaan baru. Selain itu, pendidikan berbasis teknologi bagi anak perempuan juga penting diperkuat, agar mereka memiliki bekal keterampilan digital sejak dini dan mampu bersaing di era modern.

5.8 Penduduk Berdasarkan Jenis Tamatan Pendidikan Tertinggi

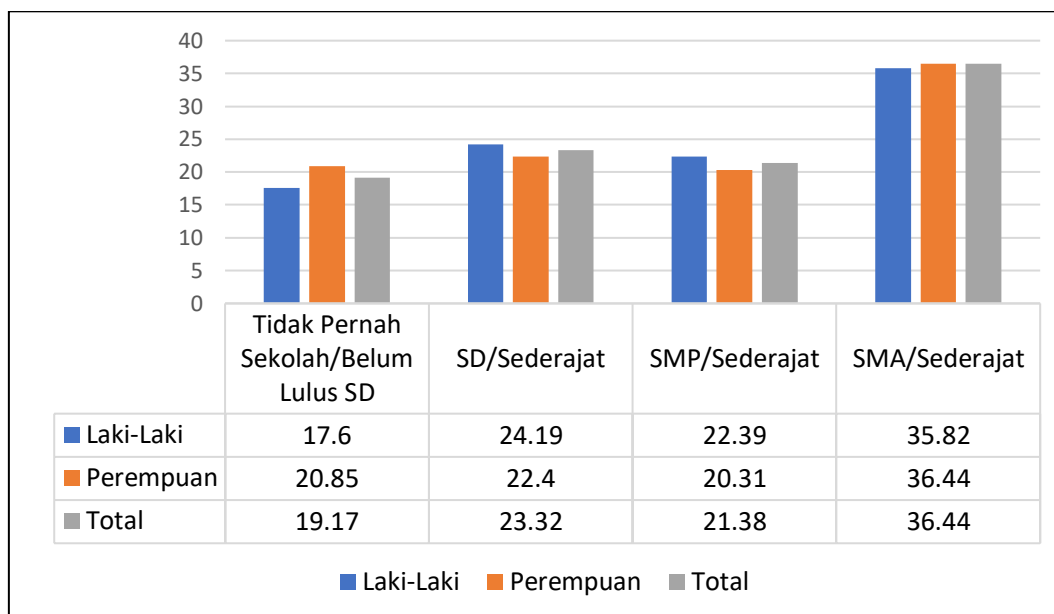
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan SMA/SMK/MA. Tujuan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ialah menambah pemahaman mendalam tentang suatu bidang ilmu atau keterampilan tertentu agar seseorang bisa memiliki karir profesional. Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang tentu dapat melakukan penelitian hingga dapat menemukan ilmu pengetahuan baru.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuannya yang dapat tergambar pada tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sebagai tenaga kerja dengan menyumbangkan pendalaman ilmu dan keterampilan sesuai dengan profesionalisme dibidangnya. Terpenuhinya aktualisasi diri atas pencapaian yang telah mereka sumbangkan lewat ilmu pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Untuk itu pemerintah mewajibkan prograb wajib belajar selama 12 tahun. Terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, setiap siswa dan siswi seharusnya menamatkan sekolah hingga SMA/SMK/MA sesuai anjuran pemerintah. Laki-laki dan perempuan diharapkan memiliki hak akses layanan pendidikan yang sama termasuk memperoleh gelar dari jenjang pendidikan tinggi.

Berikut data presentase penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kepemilikan ijazah dan jenis kelamin Kabupaten Bengkayang.

Grafik 5.9 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS)

Pada tahun 2024, distribusi ijazah tertinggi penduduk Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa masih terdapat 19,17% penduduk yang tidak pernah bersekolah, dengan proporsi perempuan (20,85%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (17,6%). Sementara itu, penduduk yang tamat SD/ sederajat tercatat sebesar 23,32%, terdiri dari 24,19% laki-laki dan 22,4% perempuan. Untuk jenjang SMP/ sederajat, persentasenya mencapai 21,38%, dengan capaian laki-laki (20,31%) dan perempuan (20,31%) relatif sama. Adapun penduduk dengan ijazah tertinggi SMA/ sederajat merupakan kelompok terbesar, yakni sebesar 36,44%, baik pada laki-laki (35,82%) maupun perempuan (36,44%).

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kabupaten Bengkayang telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat, menjadikannya kelompok terbesar. Namun demikian, masih terdapat hampir seperlima penduduk yang sama sekali tidak pernah bersekolah, dengan proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun pencapaian pendidikan perempuan relatif lebih baik pada jenjang menengah, kerentanan perempuan untuk tidak mengenyam pendidikan masih lebih besar dibandingkan laki-laki.

Tabel 5.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024

Jenis Kelamin	2023				2024			
	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Ke Atas	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Ke Atas
Laki-Laki	20.95	25.32	20.74	32.99	17.6	24.19	22.39	35.82
Perempuan	22.44	24.75	19.82	32.98	20.85	22.4	20.31	36.44
Total	21.67	25.05	20.3	32.98	19.17	23.32	21.38	36.44

Jenis Kelamin	2021				2022			
	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Ke Atas	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Ke Atas
Laki-Laki	25.74	21.62	20.52	25.74	21.55	28.41	20.72	29.32
Perempuan	29.70	24.04	19.34	29.70	23.35	23.13	19.36	34.17
Total	27.64	22.78	19.95	27.64	22.41	25.89	20.07	31.63

Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS)

5.9 Angka Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas hidup seseorang, termasuk bagi kepala rumah tangga. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang kepala rumah tangga tidak hanya berpengaruh pada kapasitas individu dalam bekerja dan memperoleh penghasilan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih stabil, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya rumah tangga.

Selain itu, kepala rumah tangga dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan, pola asuh anak, serta pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Pendidikan juga dapat memengaruhi cara pandang terhadap pentingnya pendidikan anak, sehingga keluarga lebih terdorong untuk memberikan kesempatan belajar yang optimal bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan keluarga. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga dapat mencerminkan kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengambil keputusan, serta peluang peningkatan kesejahteraan di masa mendatang.

Tabel 5.6 Kepala Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024

Kepala Rumah Tangga	2024					
	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diatas/ SMA	Total
Laki-Laki	22.05	25.40	14.16	21.11	8.76	91.49
Perempuan	4.74	1.25	0.67	1.19	0.65	8.51
Kab. Bengkayang	26.79	26.66	14.83	22.30	9.42	100.00
Kepala Rumah Tangga	2023					
	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diatas/ SMA	Total
Laki-Laki	23.43	23.05	12.61	18.62	10.79	88.50
Perempuan	5.97	2.38	0.82	1.13	1.19	11.50
Kab. Bengkayang	29.40	25.43	13.44	19.76	11.99	100.00
Kepala Rumah Tangga	2022					
	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diatas/ SMA	Total
Laki-Laki	24.57	25.50	11.26	18.65	8.79	88.76
Perempuan	7.09	1.05	0.62	1.50	0.98	11.24
Kab. Bengkayang	31.66	26.55	11.87	20.15	9.77	100.00
Kepala Rumah Tangga	2021					
	Tidak Pernah Sekolah/Belum Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diatas/ SMA	Total
Laki-Laki	27.13	22.98	14.53	18.56	7.52	90.73
Perempuan	5.86	1.56	1.00	0.36	0.50	9.27
Kab. Bengkayang	32.99	24.54	15.53	18.92	8.02	100.00

Sumber Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang (SUSENAS)

Berdasarkan data terakhir, pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga masih didominasi oleh kelompok berpendidikan rendah. Persentase terbesar terdapat pada kategori tidak pernah sekolah (26,79%) dan tamat SD/ sederajat (26,66%). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kepala rumah tangga belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Sementara itu, kepala rumah tangga yang berhasil menyelesaikan SMP/ sederajat hanya 14,83%, sedangkan yang tamat SMA/ sederajat sebesar 22,30%. Adapun mereka yang menempuh pendidikan di atas SMA masih relatif kecil, yakni 9,42%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya manusia pada level rumah tangga masih terbatas dari sisi pendidikan, sehingga dapat berdampak pada akses pekerjaan yang layak serta kualitas kesejahteraan keluarga.

BAB VI

BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Pemberdayaan perempuan ditunjukkan dengan bagaimana perempuan mandiri dengan memiliki pendapatan sendiri. Laki-laki dan perempuan diharapkan sama-sama terlibat dalam pembangunan ekonomi dengan cara memiliki pekerjaan. Peningkatan akses, kesempatan, dan perlindungan bagi perempuan dalam pekerjaan, serta kesetaraan upah dan posisi, merupakan indikator penting pemberdayaan perempuan.

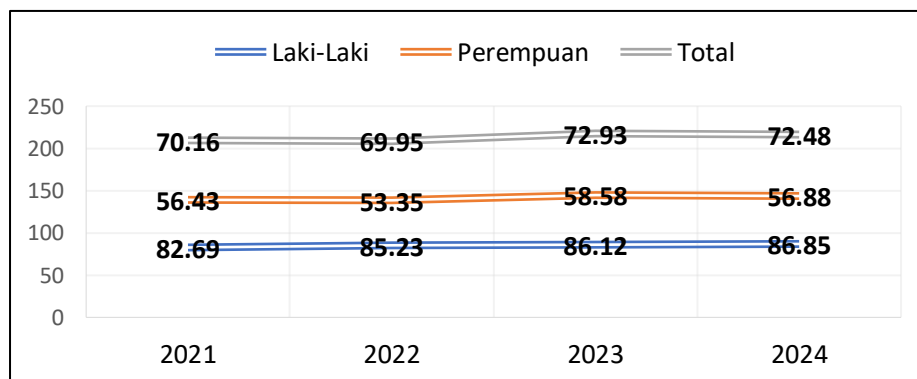
Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

6. 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Kerja (APK) atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Secara sederhana, APK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Grafik 6.1 Persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional

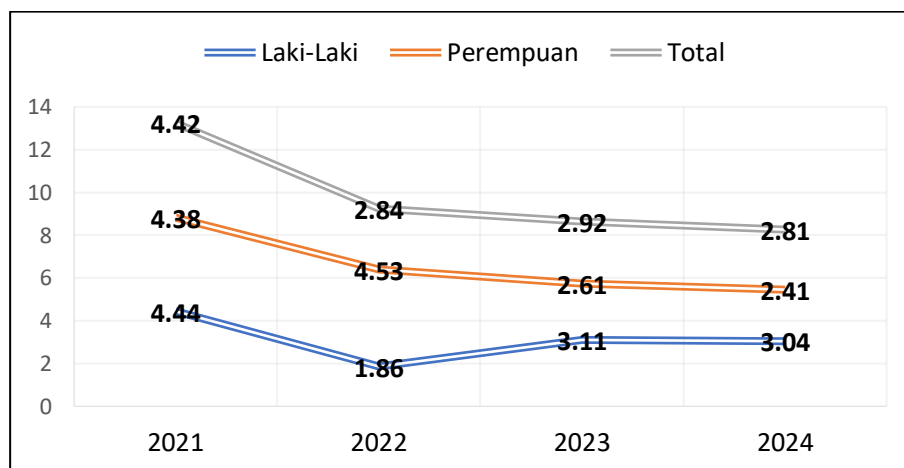
Berdasarkan data, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2022 sempat menurun sebesar 3,08 poin persentase dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 5,23 poin persentase, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 1,7 poin persentase. Berbeda dengan pola fluktuatif pada perempuan, TPAK laki-laki justru menunjukkan tren yang terus meningkat dan konsisten lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga sehingga secara ekonomi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan penduduk perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran meliputi mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. TPT mengukur seberapa besar proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Grafik 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



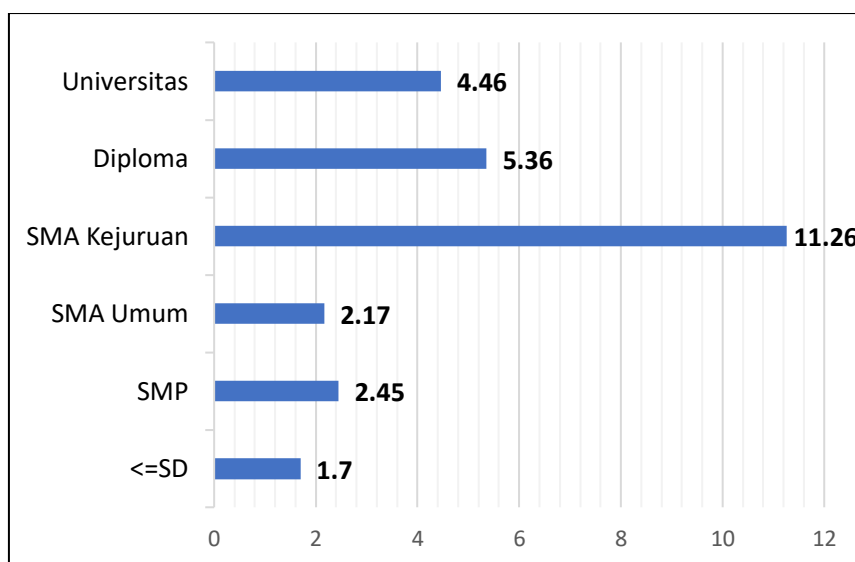
Sumber Survei Angkatan Kerja Nasional

Data gender menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 TPT perempuan menurun cukup besar menjadi 1,92

persen, dan kembali sedikit turun pada tahun 2024 menjadi 0,20 persen. Sementara itu, TPT laki-laki pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,86 persen atau menurun 2,58 poin persentase dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 4,44 persen. Pada tahun 2023, TPT laki-laki meningkat menjadi 3,11 persen atau naik 1,25 poin persentase dari tahun sebelumnya, lalu kembali sedikit menurun sebesar 0,07 poin persentase pada tahun 2024.

Dinamika TPT di kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan lapangan kerja semakin membaik, meskipun masih terjadi fluktuasi terutama pada kelompok laki-laki. Penurunan signifikan pada TPT perempuan hingga 2024 mengindikasikan adanya perbaikan akses perempuan terhadap pasar kerja. Namun demikian, kenaikan kembali pada TPT laki-laki di tahun 2023 menandakan bahwa penciptaan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan masih perlu menjadi perhatian.

Grafik 6.3 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat pendidikan yang Ditamatkan, di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Sumber Survei Angkatan Kerna Nasional Agustus 2024

Persentase angka pengangguran terbanyak di kabupaten Bengkayang merupakan tamatan SMA kejuruan sebesar 11,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya pengangguran yang berpendidikan SMA dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan khususnya pekerjaan di sektor formal yang membutuhkan pekerja dengan kualifikasi pendidikan tersebut. Pengangguran dengan tingkat pendidikan tamat diploma turut mendominasi pengangguran kabupaten Bengkayang yaitu sebesar 5,36 persen. Penyebab utama pengangguran terdidik di Indonesia adalah karena perencanaan pengembangan pendidikan yang tidak sebanding dengan perkembangan lapangan pekerjaan (Hidayatullah, 2018).

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faga Arta Urtalina dan I Ketut Sudibia (2019), tingginya tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma dan sarjana

disebabkan karena kurang selarasnya antara perencanaan pendidikan dan juga lapangan pekerjaan yang tersedia. Ditambah lagi dengan fakta bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja akan semakin tinggi pula motivasinya untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai sehingga cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan.

6.3 Lapangan Pekerjaan Utama

Struktur perekonomian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada. Indikator penyerapan tenaga kerja dikelompokkan menjadi 9 sektor yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas dan Air; Konstruksi; Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate , dan Usaha Persewaan; serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Tabel 6.1 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha dan Jenis kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024 (persen)

Lapangan Usaha	Penduduk 15+ yang Bekerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	31,92	19,43	51,35
Manufaktur	13,97	2,86	16,83
Jasa	16,35	15,48	31,83
Kabupaten	62,23	37,77	100,00

Sumber Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus Tahun 2024

Pekerjaan utama masyarakat kabupaten Bengkayang terbesar ada di sektor pertanian dengan persentase sebesar 51,35 persen, selanjutnya pada sektor manufaktur sebesar 16,83 persen, sektor jasa sebesar 31,83 persen. Penyerapan tenaga kerja terbesar di sektor pertanian sesuai dengan struktur perekonomian kabupaten Bengkayang yang masih didominasi dari sektor ini.

6.4 Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang terdiri dari: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dipertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja tak dibayar.

- 1) Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan menggunakan buruh atau pekerja tidak dibayar dan/atau buruh atau pekerja tidak tetap.
- 3) Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
- 4) Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap juga termasuk kelompok buruh atau karyawan ini, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang atau rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan, batasannya adalah tiga bulan. Kemudian majikan bisa lebih dari satu, bila majikan tersebut adalah instansi atau lembaga.
- 5) Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian, baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian di sini meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, serta jasa pertanian.
- 6) Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi atau persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan.
- 7) Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar, terdiri atas:
 - a) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri atau anak yang membantu suaminya atau ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.

- b) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.
- c) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

Tabel 6.2 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Status Pekerjaan	Penduduk 15+ yang Bekerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	15,51	8,02	23,53
Berusaha dibantu buruh tidak	9,54	4,04	13,58
Berusaha dibantu buruh	2,24	0,25	2,49
Buruh/karyawan/pegawai	22,67	10,55	33,22
Pekerja bebas	8,57	3,00	11,57
Pekerja keluarga/tidak dibayar	3,7	11,92	15,62
Kabupaten Bengkayang	62,23	37,77	100

Sumber Survei Angkatan Kerna Nasional Agustus 2024

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang yang masih bertumpu pada sektor pertanian serta rendahnya kualitas tenaga kerja perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Penyediaan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6.5 Angka Kemiskinan

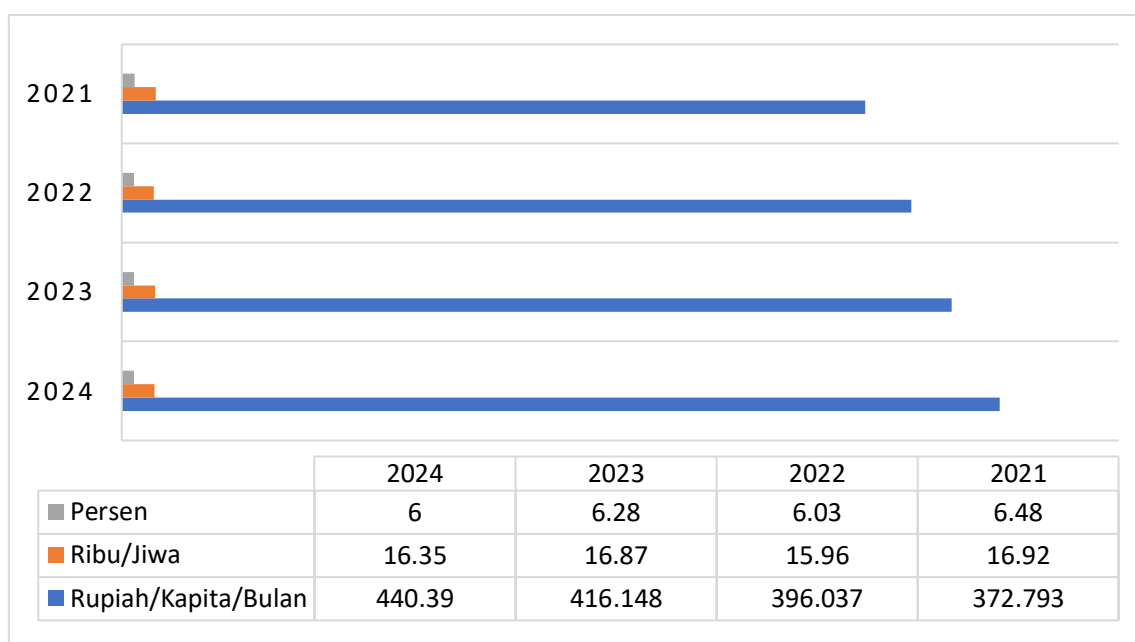
Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.

Kemiskinan tentu saja memberi dampak seperti angka kriminalitas meningkat. Hanya demi memenuhi kebutuhan pokok, seseorang rela melakukan cara apapun demi mencukupi kebutuhan keluarga. Termasuk tindakan kriminal mulai dari penipuan, pencurian, perampokan hingga pembunuhan. Selain itu juga angka kematian meningkat, karena kebutuhan gizi tidak terpenuhi dan akses layanan kesehatan sulit. Tidak hanya akses kesehatan namun juga

pendidikan. Padahal, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sehingga akses pendidikan yang tertutup dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah.

Oleh karena itu data terkait jumlah penduduk miskin sangat penting, agar masyarakat miskin bisa menjadi sejahtera dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran. Berikut adalah data grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang:

Grafik 6.4 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan, Jumlah (ribu/jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin, di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021-2024



Sumber Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret, Kabupaten Bengkayang

Garis kemiskinan di Kabupaten Bengkayang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2021 sebesar Rp372.793 per kapita per bulan, meningkat menjadi Rp396.037 pada tahun 2022, lalu naik lagi menjadi Rp416.148 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 mencapai Rp440.390. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat semakin mahal akibat pengaruh inflasi dan peningkatan harga barang serta jasa.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 16,92 ribu jiwa, turun menjadi 15,96 ribu jiwa pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 16,87 ribu jiwa sebelum akhirnya menurun lagi menjadi 16,35 ribu jiwa pada tahun 2024.

Walaupun terjadi naik-turun dalam jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun justru menunjukkan tren menurun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan total penduduk dan peningkatan jumlah penduduk non-miskin lebih besar

dibandingkan pertumbuhan penduduk miskin, sehingga secara proporsional tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkayang semakin membaik.

Dari sisi gender, penting diperhatikan bahwa perempuan cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan dibanding laki-laki, baik karena keterbatasan akses pekerjaan layak, pendidikan, maupun tanggung jawab domestik yang lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan kesetaraan gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat.

6.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

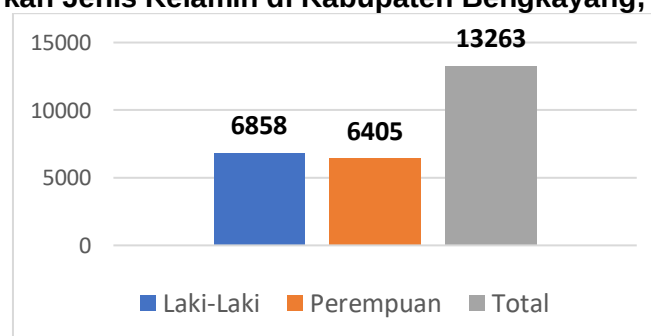
Keberadaan UMKM tentu sebagai salah satu tulang punggung ekonomi karena mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM diakui oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk dalam Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagi perempuan, UMKM tentu menjadi aksi nyata agar bisa mandiri dan mensejahterahkan diri dan keluarga. UMKM dapat membuka ladang pekerjaan bagi masyarakat untuk itu peran UMKM sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pendapatan, hingga memperkuat ketahanan ekonomi. UMKM juga memiliki daya saing nasional dengan terus memberi inovasi produk dan layanan. Fleksibilitas dalam mengikuti tren pasar yang terus berubah, UMKM bisa adaptif dalam menciptakan produk baru yang memiliki nilai tambah. Sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional.

UMKM juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, dunia kewirausahaan bukan hanya menjadi pencari kerja tetapi juga pencipta lapangan kerja, sehingga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Terutama kabupaten Bengkayang memiliki objek wisata yang harus dipromosikan agar lebih berkembang.

Berikut adalah data jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkayang:

Grafik 6.5 Persentase Jumlah Usaha, Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2023



Sumber Buku Data Gender Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kabupaten Bengkayang tercatat sebanyak 13.263 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.858 UMKM dimiliki oleh laki-laki, sedangkan 6.405 UMKM dimiliki oleh perempuan. Jika dilihat dari sisi kepemilikan, laki-laki masih mendominasi jumlah UMKM. Namun, menariknya diperoleh data bahwa jumlah partisipasi kegiatan pelatihan UMKM, justru perempuan lebih banyak mengikuti pelatihan, yakni sebanyak 53 orang, dibandingkan laki-laki yang hanya 9 orang.

Dominasi kepemilikan UMKM oleh laki-laki menunjukkan bahwa peran laki-laki dalam dunia usaha masih lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan mengindikasikan adanya potensi peningkatan jumlah UMKM yang dimiliki perempuan di masa mendatang. Hal ini dapat terjadi karena perempuan semakin aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, meskipun saat ini jumlah usahanya masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

BAB VII

KETERWAKILAN PEREMPUAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilihat dalam bentuk perjuangan hak-hak perempuan dalam setiap kebijakan. Oleh karena Pengarusutamaan Gender (PUG) hadir sebagai sarana penting bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya dalam politik dan pemerintahan. Melalui PUG, perempuan didorong agar memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dengan laki-laki dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan. Dengan demikian, PUG tidak hanya memperhatikan keterwakilan perempuan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan terakomodasi dalam setiap kebijakan publik.

Meskipun telah ada kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kesepakatan internasional melalui Konvensi CEDAW yang mendesak negara-negara penandatangan untuk mengambil langkah nyata dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, data gender pada bab sebelumnya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, meskipun dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menandakan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan belum sepenuhnya tercapai dan masih diperlukan komitmen yang lebih kuat.

Dalam konteks politik dan pemerintahan, keterlibatan perempuan memiliki arti penting bukan hanya sebagai pemenuhan hak partisipasi, tetapi juga agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif gender dan adil. Kehadiran perempuan di ranah politik dapat memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman hidup perempuan benar-benar terakomodasi, sehingga pembangunan tidak hanya berpihak pada satu kelompok, melainkan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.

7.1 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD sebagai wujud demokrasi yang adil dan berkualitas, karena memastikan suara perempuan terakomodasi dalam kebijakan publik, mendorong kebijakan pro-gender dan pro-perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Selain itu kehadiran perempuan di parlemen juga berkontribusi pada penguatan fungsi legislatif, pengawasan anggaran yang lebih baik, dan membentuk peraturan daerah yang lebih responsif gender.

Keterwakilan perempuan adalah prasyarat demokrasi yang inklusif, di mana kepentingan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, terakomodasi dalam kebijakan publik. Kemudian perspektif perempuan yang lebih akomodatif dan memperhatikan jangka panjang menghadirkan pembentukan kebijakan yang lebih responsif gender, menguntungkan perempuan, anak-anak, dan masa depan.

Keterwakilan perempuan dapat menguatkan tiga fungsi DPRD, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ini akan membuat proses pembentukan peraturan dan penganggaran lebih berpihak pada perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Kehadiran perempuan juga mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara sesuai dengan prinsip "No One Left Behind" dari SDGs menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, dalam pembangunan. Ini sesuai dengan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Tabel 7.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin (orang) di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Gerindra	5	1	6
Demokrat	3	1	4
PDI-Perjuangan	4	1	5
Golkar	4	1	5
Nasdem	2	2	4
Hanura	2	-	2
Perindo	2	-	2
PKB	1	1	2
2024	23	7	30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bengkayang Dalam Angka 2025, Kab. Bengkayang

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Bengkayang) masih berada di angka 23,33%, lebih rendah dari ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan daerah masih belum optimal, sehingga perlu adanya dorongan dan upaya lebih lanjut agar representasi perempuan bisa mencapai standar yang ditetapkan.

7.2 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif agar mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di posisi strategis dalam lembaga eksekutif daerah. Sehingga perempuan dapat terlibat dalam perumusan kebijakan yang responsif gender. Analisis dilakukan berdasarkan data seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tujuan penyajian data ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan dan proporsi gender dalam struktur pemerintahan daerah, baik pada jabatan fungsional maupun struktural. Melalui pemetaan ini, diharapkan dapat terlihat sejauh mana prinsip kesetaraan dan keadilan gender telah diimplementasikan dalam manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

7.2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jumlah pegawai perempuan dalam jajaran PNS memiliki arti penting, karena keberadaan mereka tidak hanya mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam birokrasi, tetapi juga menentukan sejauh mana kebijakan dan pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan perempuan dalam PNS membuka ruang yang lebih luas bagi terciptanya keberagaman perspektif dalam perumusan program dan pelayanan pemerintahan, serta menjadi indikator penting bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah.

Tabel 7. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Jabatan	Pegawai Negeri Sipil		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	21	6	27
Administrator	114	33	147
Pengawas	107	63	170
Eselon V	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru	633	912	1.545
Jabatan Fungsional Medis	220	625	845
Jabatan Fungsional Teknis	181	114	295
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	415	308	723
Total	1.691	2.061	3.752

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bengkayang Dalam Angka 2025, Kab. Bengkayang

Jumlah PNS perempuan di Kabupaten Bengkayang memang lebih banyak dibanding laki-laki, menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor pemerintahan cukup terbuka. Namun, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya kesetaraan gender, sebab keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh peran strategis sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif.

Banyaknya komposisi perempuan pada jabatan fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan juga dipengaruhi oleh kebutuhan daerah yang besar di sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus faktor sosial-budaya yang melekat bahwa profesi tersebut lebih identik dengan perempuan, misalnya perawat atau guru PUD, TK, dan SD. Fenomena ini umum terjadi di banyak daerah, di mana bidang yang berhubungan dengan peran pengasuhan lebih diminati perempuan, sementara posisi kepemimpinan masih didominasi laki-laki. Dengan demikian, meskipun jumlah perempuan PNS lebih tinggi, pemerataan peran dalam jabatan struktural tetap perlu diperhatikan.

Tabel 7.3 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Jabatan	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
Administrator	-	-	-
Pengawas	-	-	-
Eselon V	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru	427	779	1.206
Jabatan Fungsional Medis	148	351	499
Jabatan Fungsional Teknis	24	11	35
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	92	194	286
Total	691	1.335	2.026

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bengkayang Dalam Angka 2025, Kab. Bengkayang

Data PPPK juga menunjukkan pola serupa dengan PNS, yaitu partisipasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa peluang perempuan untuk masuk ke sektor pemerintahan melalui skema PPPK cukup besar. Namun, dominasi perempuan masih banyak bertumpu pada jabatan fungsional tertentu, terutama sebagai guru dan tenaga kesehatan, yang memang menjadi kebutuhan utama daerah sekaligus profesi yang secara sosial lebih diminati oleh perempuan.

Meskipun pada jabatan fungsional umum/pelaksana jumlah perempuan (194 orang) juga lebih banyak dibanding laki-laki (92 orang), fenomena ini memperlihatkan bahwa secara kuantitatif perempuan cukup mendominasi. Akan tetapi, jika dilihat dari keragaman bidang dan distribusi jabatan, peran perempuan masih terkonsentrasi pada profesi yang identik dengan peran pengasuhan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam jumlah memang terlihat, tetapi dari sisi distribusi jabatan dan keterwakilan di posisi strategis masih perlu ditingkatkan.

Tabel 7.4 Jumlah PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Jabatan	PNS + PPPK		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sekolah Dasar (SD)	4	-	4
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	12	2	14
Sekolah Menengah Atas (SMA)	301	147	448
Diploma I/Akta I	5	7	12
Diploma II/Akta II	50	40	90
Diploma III/Akta III	367	1.014	1.381
Diploma IV/Akta IV	50	76	126
S1/Sarjana	1.425	1.983	3.408
S2/ Paska Sarjana	166	127	293
S3/Dokter/Ph.D	2	-	2
Total	2.382	3.396	5.778

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bengkayang Dalam Angka 2025, Kab. Bengkayang

Data pendidikan tertinggi ASN menunjukkan bahwa secara jumlah, perempuan lebih unggul dibanding laki-laki, terutama pada jenjang S1/Sarjana (perempuan 1.983 orang dan laki-laki 1.425 orang) serta Diploma III/Akta III (perempuan 1.014 orang dan laki-laki 367 orang). Fakta ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki akses pendidikan tinggi yang cukup baik dan mampu mendominasi pada tingkat sarjana maupun diploma. Namun, dominasi tersebut sebagian besar tetap terkonsentrasi pada jabatan fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan yang menjadi bidang kerja paling banyak diminati perempuan.

Sebaliknya, pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2) laki-laki lebih banyak dibanding perempuan (166 orang berbanding 127 orang), dan pada tingkat pendidikan tertinggi S3/Doktor/Ph.D hanya terdapat laki-laki (2 orang) sementara perempuan tidak ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pada akses atau kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural atau posisi strategis, karena pendidikan yang lebih tinggi sering menjadi salah satu syarat penting untuk menduduki jabatan pimpinan.

Meskipun jumlah ASN perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada jenjang S1 maupun Diploma, tantangan masih terlihat ketika masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Perempuan cenderung terhenti pada jenjang sarjana dan relatif sedikit yang melanjutkan ke S2, bahkan tidak ada yang mencapai S3. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor beban ganda, yaitu tanggung jawab domestik dan pekerjaan, keterbatasan kesempatan atau dukungan dari lingkungan kerja, serta persepsi bahwa pendidikan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peluang karir bagi perempuan.

Kondisi ini berimplikasi pada keterwakilan perempuan di jabatan strategis, karena pendidikan pascasarjana sering menjadi syarat utama untuk menduduki posisi pimpinan. Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif perempuan ASN lebih banyak, peluang mereka untuk menembus level pendidikan tertinggi dan mengisi jabatan struktural strategis masih lebih terbatas dibanding laki-laki.

Tabel 7.5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan 1				
1. I/A	Juru Muda	-	-	-
2. I/B	Juru Muda Tingkat I	-	-	-
3. I/C	Juru	1	1	-
4. I/D	Juru Tingkat I	5	-	5
Golongan II				
5. II/A	Pengatur Muda	21	12	33
6. II/B	Pengatur Muda Tingkat I	54	21	75
7. II/C	Pengatur	118	154	272
8. II/D	Pengatur Tingkat I	81	77	158

Pangkat/Golongan/Ruang		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan III				
9. III/A	Penata Muda	253	330	583
10. III/B	Penata Muda Tingkat I	379	510	889
11. III/C	Penata	230	328	558
12. III/D	Penata Tingkat I	316	471	787
Golongan IV				
13. IV/A	Pembina	116	82	198
14. IV/B	Pembina Tingkat I	100	68	168
15. IV/C	Pembina Utama Muda	17	7	24
16. IV/D	Pembina Utama Madya	-	-	-
17. IV/C	Pembina Utama	-	-	-
Jumlah		1.691	2.061	3.752

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bengkulu Dalam Angka 2025, Kab. Bengkulu

Data kepangkatan menunjukkan bahwa pada Golongan III, jumlah PNS perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yang menandakan keterlibatan perempuan cukup besar pada level menengah. Namun, ketika memasuki jenjang kepangkatan yang lebih tinggi, khususnya Golongan IV, dominasi laki-laki kembali terlihat. Pada golongan IV/A Pembina, terdapat 116 laki-laki dibanding 82 perempuan; di golongan IV/B Pembina Tingkat I laki-laki mencapai 100 orang sementara perempuan 68 orang; dan pada golongan IV/C Pembina Utama Muda jumlah laki-laki (17 orang) jauh lebih tinggi dibanding perempuan (7 orang).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki representasi besar pada golongan menengah, akses mereka untuk mencapai kepangkatan tertinggi masih terbatas. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah persyaratan pendidikan pascasarjana (S2/S3), yang jumlahnya lebih banyak ditempuh oleh laki-laki dibanding perempuan. Selain itu, hambatan struktural dan sosial seperti beban ganda juga dapat menjadi penghalang perempuan dalam mengembangkan karir hingga level puncak birokrasi. Dengan demikian, kesenjangan gender dalam ASN tidak hanya terlihat dari jumlah, tetapi juga dari keterwakilan perempuan di jenjang kepangkatan tertinggi.

Tabel 7.6 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu, Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-
V	21	2	23
VI	-	-	-
VII	138	437	575

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
VIII	-	-	-
IX	488	857	1.345
X	44	39	83
XI	-	-	-
XII	-	-	-
XIII	-	-	-
XIV	-	-	-
XV	-	-	-
XVI	-	-	-
XVII	-	-	-
Jumlah	691	1.335	2.026

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bengkulu Dalam Angka 2025, Kab. Bengkulu

Data PPPK menunjukkan bahwa partisipasi perempuan secara umum lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan menariknya pada kepangkatan tertinggi, yaitu Golongan X, perbedaan jumlah antara laki-laki (44 orang) dan perempuan (39 orang) tidak terlalu jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa di skema PPPK, peluang perempuan untuk mencapai golongan tinggi relatif lebih setara dibandingkan pada PNS.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik rekrutmen PPPK yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan fungsional, terutama guru dan tenaga kesehatan, di mana perempuan memang mendominasi. Dengan demikian, meskipun pola umum tetap menunjukkan dominasi perempuan pada jabatan fungsional, kesenjangan gender dalam hal kepangkatan tertinggi di PPPK terlihat lebih kecil dibandingkan dengan PNS.

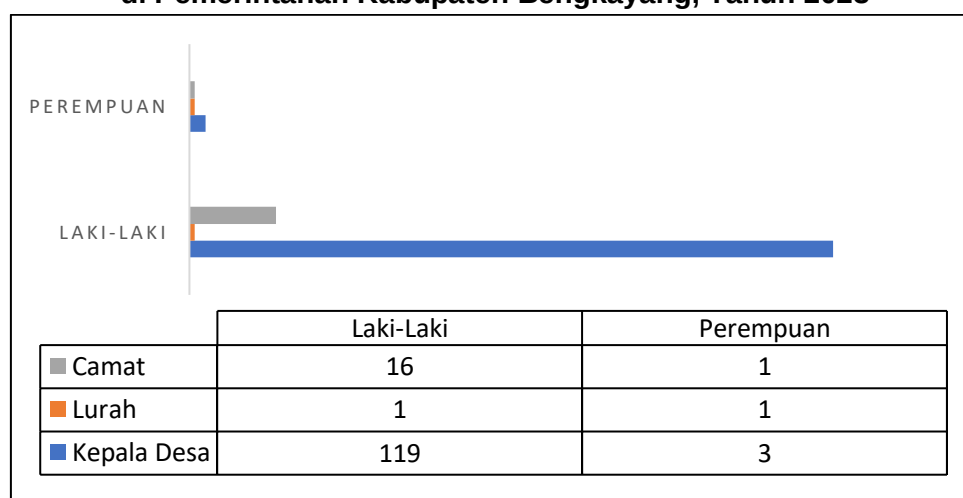
Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada dasarnya telah memberikan ruang yang cukup luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, khususnya pada jabatan fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan yang secara umum lebih banyak diisi oleh perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap lapangan kerja di sektor publik relatif terbuka, meskipun keterlibatannya masih terpusat pada bidang tertentu.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender pada level yang lebih tinggi, diperlukan upaya peningkatan jenjang pendidikan bagi ASN perempuan, khususnya ke tingkat pascasarjana (S2). Langkah ini penting agar komposisi perempuan dalam jabatan pimpinan maupun pada tingkat kepangkatan tertinggi dapat lebih seimbang dengan laki-laki. Dengan peningkatan kualitas dan kualifikasi pendidikan, diharapkan keterwakilan perempuan tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga semakin kuat dalam peran strategis dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu.

7.2.2 Kepemimpinan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

Struktur pemerintahan daerah terdiri atas berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Pada setiap level kepemimpinan tersebut, camat, lurah, dan kepala desa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan tersebut menjadi penting untuk mewujudkan prinsip kesetaraan gender dan memastikan bahwa suara serta kebutuhan perempuan dapat terakomodasi dalam proses pembangunan di tingkat lokal.

Grafik 7.1 Jumlah Camat, Lurah, dan Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2023



Sumber: Buku Data Gender Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023

Keterwakilan perempuan dalam jabatan kepemimpinan di tingkat lokal, baik di kecamatan, kelurahan, maupun desa, masih menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa posisi kepala desa di Kabupaten Bengkayang hampir seluruhnya diduduki oleh laki-laki, dengan jumlah 122 orang, sedangkan perempuan hanya 3 orang. Hal ini menggambarkan bahwa kepemimpinan desa masih sangat maskulin. Pada tingkat kecamatan, kondisi serupa juga terlihat: dari 17 camat, sebanyak 16 orang merupakan laki-laki, dan hanya 1 orang perempuan yang berhasil menduduki posisi tersebut. Sementara itu, pada level kelurahan, distribusi kepemimpinan tampak lebih seimbang, yaitu 1 lurah laki-laki dan 1 lurah perempuan.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa meskipun ada peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lokal, jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan lokal menjadi penting tidak hanya untuk mewujudkan kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan adanya perspektif dan kebijakan yang lebih inklusif dalam pembangunan masyarakat.

BAB VIII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang pro-gender dan ramah anak. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak telah dibangun sejak lama. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, terkait pemenuhan hak anak, Indonesia juga ikut berkomitmen pada Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/UNCRC) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.

Dalam konteks nasional, berbagai regulasi telah disahkan untuk memperkuat perlindungan tersebut, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan payung hukum lebih komprehensif dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak dan perempuan.

Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, data masih menunjukkan bahwa perempuan dan anak, terutama pada kelompok usia dini, tetap menjadi korban paling rentan. Oleh karena itu, penguatan implementasi regulasi serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.

Berikut disajikan pemaparan data kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai bentuk kerentanan yang masih dialami perempuan dan anak, sekaligus menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan, pencegahan, serta penanganan kasus kekerasan secara lebih tepat sasaran.

8.1 Sumber Data Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam laporan ini diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). SIMFONI PPA merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan sejak

tahun 2015 dan digunakan sebagai instrumen pencatatan, pelaporan, serta pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional.

Melalui sistem ini, data kasus yang dilaporkan oleh instansi terkait di tingkat daerah—seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, lembaga layanan, serta organisasi mitra—dihimpun dan diintegrasikan ke dalam basis data nasional. Informasi yang dicatat mencakup identitas korban, pelaku, bentuk kekerasan yang dialami, hingga layanan yang diberikan kepada korban.

Selain menggunakan data dari SIMFONI PPA, laporan ini juga memanfaatkan data dari UPTD PPA Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan SIMFONI PPA yang memaparkan data kasus secara umum, data dari UPTD PPA Bengkayang memberikan gambaran lebih detail mengenai jenis kekerasan yang paling sering terjadi serta lokasi kecamatan tempat kasus tersebut dilaporkan. Oleh karena itu, penggunaan data UPTD tidak hanya memperkuat keakuratan informasi, tetapi juga memperkaya analisis karena mampu menunjukkan pola dan sebaran kasus secara lebih komprehensif.

Tujuan tersajinya pemaparan data kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dari SIMFONI PPA dan UPTD PPA Bengkayang, digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi upaya perlindungan perempuan dan anak di berbagai tingkatan, khususnya di Kabupaten Bengkayang.

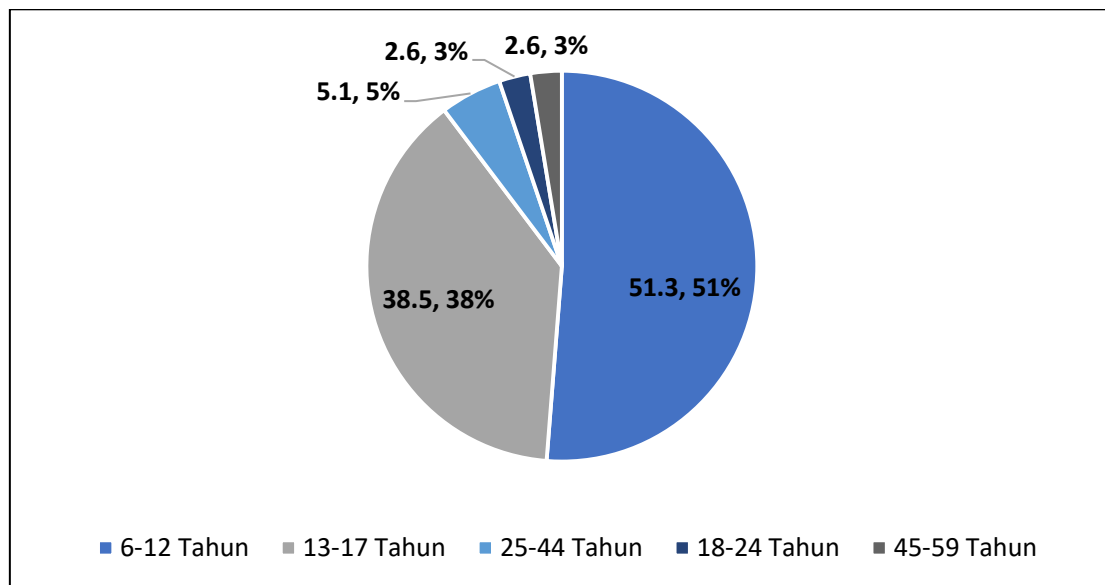
8.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang. Dari jumlah tersebut, korban didominasi oleh perempuan sebanyak 39 orang, sedangkan korban laki-laki berjumlah 3 orang. Adapun mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki pada rentang usia 18–24 tahun.

Fenomena tingginya pelaku pada usia tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, usia 18–24 tahun merupakan fase transisi menuju dewasa, di mana sebagian individu masih belum stabil secara emosional maupun psikologis. Kedua, pada rentang usia ini, tingkat kontrol diri dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum seringkali belum matang. Ketiga, pengaruh lingkungan sosial, budaya patriarki, serta akses terhadap pergaulan bebas dan media yang kurang sehat dapat memperkuat perilaku agresif dan berpotensi melahirkan tindak kekerasan. Selain itu, lemahnya pendidikan karakter dan literasi gender juga berkontribusi pada munculnya pola pikir yang membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan.

Dengan demikian, data ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif, terutama melalui edukasi kesetaraan gender, penguatan pendidikan moral dan karakter, serta penciptaan ruang-ruang aman bagi remaja dan pemuda agar terhindar dari perilaku menyimpang yang berujung pada kekerasan.

Grafik 8.1 Korban Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Usia di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024

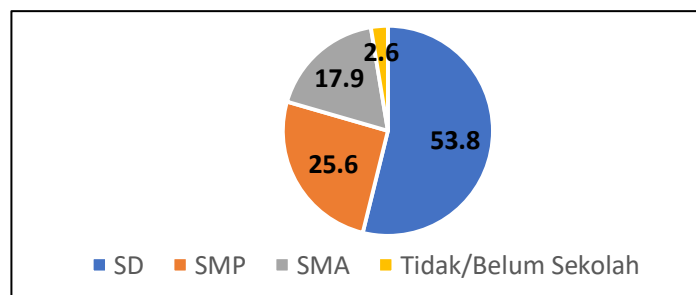


Sumber: SIMFONI PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data menunjukkan bahwa mayoritas korban perempuan berada pada kelompok usia dini, khususnya anak-anak usia 6–12 tahun (51,3%) dan remaja usia 13–17 tahun (38,5%). Angka ini sangat tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa, yakni usia 18–24 tahun (2,6%), 25–44 tahun (5,1%), dan 45–59 tahun (2,6%). Hal ini menggambarkan bahwa anak-anak dan remaja perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.

Selanjutnya tercatat sebanyak 3 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki di Kabupaten Bengkayang, seluruhnya terjadi pada kelompok usia 13–17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki juga tidak luput dari kerentanan, terutama pada masa peralihan menuju dewasa yang seringkali diwarnai dengan tekanan lingkungan, pergaulan, maupun lemahnya pengawasan.

Grafik 8.2 Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



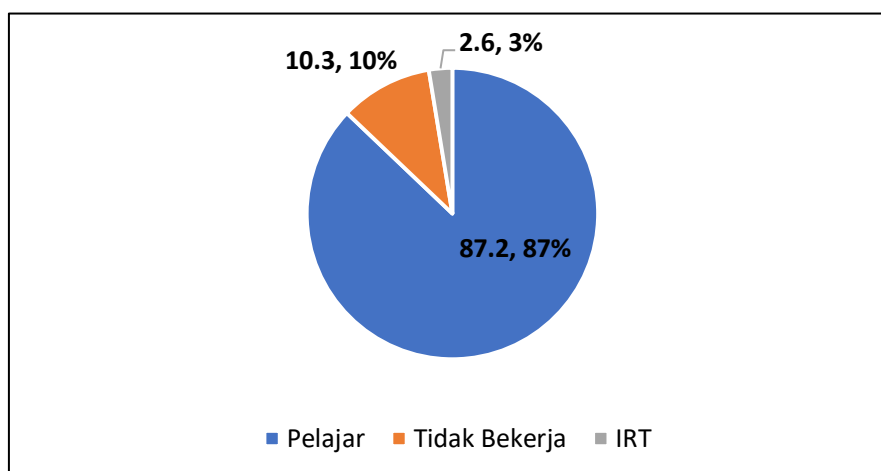
Sumber: SIMFONI PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagian besar korban perempuan mengalami kekerasan berada pada tingkat pendidikan dasar. Korban dengan latar belakang pendidikan SD mencapai 53,8%, disusul SMP sebesar 25,6%, SMA 17,9%, serta korban yang tidak atau belum sekolah sebanyak 2,6%.

Tingginya persentase korban pada tingkat pendidikan SD dapat mencerminkan kerentanan anak-anak perempuan yang masih berusia dini. Pada tahap ini, mereka umumnya belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri, cenderung patuh pada orang dewasa, serta kurang memahami risiko maupun cara melaporkan kekerasan yang dialami. Selain itu, keterbatasan akses informasi, minimnya pendidikan seksual dan reproduksi, serta lemahnya pengawasan lingkungan juga menjadi faktor yang memperbesar kerentanan anak-anak pada usia sekolah dasar.

Data ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan sejak usia dini, melalui pendidikan yang ramah anak, peningkatan literasi perlindungan diri, serta keterlibatan keluarga dan sekolah dalam memberikan pengawasan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak perempuan.

Grafik 8.3 Korban Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Pekerjaan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



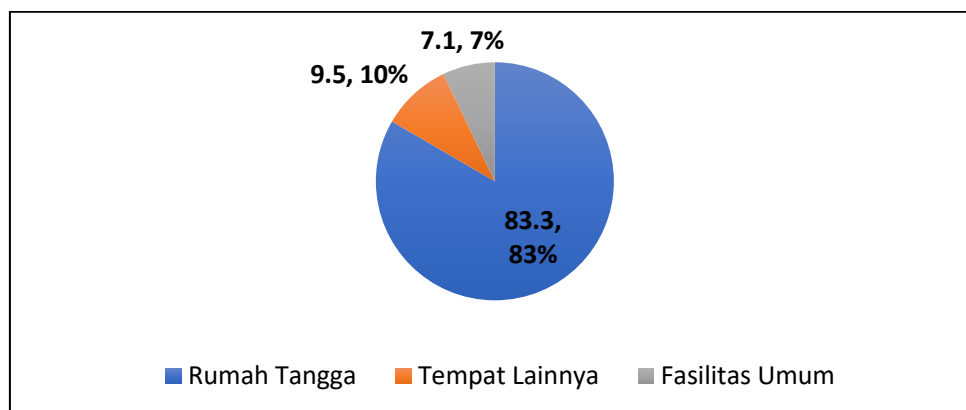
Sumber: SIMFONI PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bengkayang sebagian besar berasal dari kelompok anak perempuan atau yang berstatus sebagai pelajar, yaitu mencapai 87,2%. Selain itu, terdapat korban dari kelompok perempuan yang tidak bekerja sebesar 10,3%, serta ibu rumah tangga sebanyak 2,6%. Selain itu, tercatat pula anak laki-laki berstatus pelajar yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2024, dengan rincian tingkat pendidikan SD sebesar 33,3% dan SMP sebesar 66,7%.

Tingginya angka korban pada kelompok pelajar menunjukkan bahwa anak dan remaja perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan mereka dalam melindungi diri, minimnya pemahaman terkait hak

dan mekanisme perlindungan, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Sementara itu, kerentanan perempuan tidak bekerja dan ibu rumah tangga juga menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi pada berbagai lapisan sosial, terutama pada mereka yang memiliki ketergantungan ekonomi atau akses terbatas terhadap sumber daya.

Grafik 8.4 Korban Kekerasan Pada Perempuan (Dewasa dan Anak) Menurut Tempat Kejadian Di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2024



Sumber: SIMFONI PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tempat kejadian, kasus kekerasan pada tahun 2024 sebagian besar terjadi di rumah tangga (83,3%), kemudian di tempat lainnya (9,5%), serta di fasilitas umum (7,1%). Tingginya angka kejadian di lingkungan rumah tangga menunjukkan bahwa kekerasan kerap kali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, kerabat, maupun tetangga. Selain itu, pada korban anak laki-laki, kasus kekerasan juga paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga (83,3%), disusul di fasilitas umum (7,1%), dan di tempat lainnya (9,6%).

Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa meskipun mayoritas korban adalah anak-anak yang masih berstatus pelajar, kasus kekerasan tidak banyak terjadi di sekolah atau fasilitas umum. Anak-anak lebih sering mengalami kekerasan di ranah domestik, di mana ruang lingkup pengawasan cenderung terbatas, dan pelaku biasanya memiliki relasi kuasa yang lebih dominan terhadap korban.

Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak di lingkungan keluarga dan komunitas, melalui peningkatan kesadaran orang tua, edukasi perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan yang aman untuk mencegah terulangnya kekerasan di ranah rumah tangga. Lebih lanjut, untuk memahami pola kekerasan yang terjadi secara lebih mendalam, data dari UPTD PPA disajikan dalam bentuk grafik yang memuat jenis-jenis kasus serta sebaran wilayah kecamatan tempat kasus tersebut terjadi.

**Tabel 8.1 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak UPTD PPA
Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

No.	Kecamatan	JUMLAH KORBAN PER BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Sanggau Ledo													0
2	Ledo							1						1
3	Sungai Raya													0
4	Samalantan			1			1	1						3
5	Jagoi Babang													0
6	Teriak	2				1			1			1	1	6
7	Sungai Betung	2			5	1			2	2				12
8	Seluas			1	1									2
9	Monterado	2			2									4
10	Bengkayang							1	1					2
11	Lumar													0
12	Capkala	1												1
13	Suti Semarang										7			7
14	Lembah Bawang													0
15	Siding							1						1
16	Sungai Raya			1					1	1				3
17	Tujuh Belas													0
Jumlah Perbulan		7	0	3	8	2	1	4	5	3	7	1	1	42

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Bengkayang

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024 di Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa jenis kekerasan paling banyak terjadi pada persetubuhan anak 24 kasus diikuti 9 kasus pencabulan anak, dan 3 kasus lainnya pada kdrt, penganiayaan/kekerasan fisik, dan ABH. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak, merupakan kelompok paling rentan menjadi korban. Kasus kekerasan sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga, yang menandakan bahwa pelaku umumnya adalah orang-orang terdekat korban, baik anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Tingginya keterlibatan pelaku laki-laki usia muda juga mengindikasikan perlunya penguatan pendidikan karakter, kesadaran gender, serta pengawasan sosial.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan individu, melainkan isu struktural yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. Upaya perlindungan hukum, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta penyediaan layanan pemulihan yang ramah anak dan perempuan menjadi langkah penting agar tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

8.3 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023

Walaupun fokus utama pembahasan terletak pada data tahun 2024 sebagai data terbaru, penyajian data tahun-tahun sebelumnya tetap dilakukan sebagai bahan pembandingan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus menjadi dasar dalam menilai kecenderungan maupun efektivitas upaya penanganan yang telah dilaksanakan.

8.3.1 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dewasa, Tahun 2023

Pada tahun 2023, tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa di Kabupaten Bengkayang yang seluruhnya terjadi di ranah rumah tangga. Rincian jenis kekerasan yang dialami korban meliputi kekerasan seksual sebanyak 3 kasus, penelantaran sebanyak 1 kasus, serta bentuk kekerasan lainnya sebanyak 1 kasus. Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan, justru dapat menjadi ruang yang paling rentan terhadap terjadinya kekerasan.

Dominasi kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan seringkali tidak memiliki kendali atas tubuh dan hak-haknya. Faktor lain yang berkontribusi adalah budaya patriarki, minimnya kesadaran gender, serta rendahnya pemahaman terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Dalam konteks regulasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang secara tegas mengatur perlindungan bagi perempuan dan anggota keluarga lainnya dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. UU ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari kekerasan, serta mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban.

Dengan demikian, keberadaan UU PKDRT bersama regulasi lain seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan berbasis rumah tangga. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada penguatan implementasi di lapangan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta dukungan masyarakat.

8.3. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kabupaten Bengkayang mencatat sebanyak 50 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, korban didominasi oleh anak perempuan sebanyak 39 orang, sedangkan anak laki-laki berjumlah 8 orang.

Berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan 35 kasus, kemudian kekerasan fisik sebanyak 3 kasus, kekerasan psikis sebanyak 1 kasus, serta penelantaran anak sebanyak 2 kasus.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak, khususnya perempuan, menunjukkan adanya kerentanan yang serius. Faktor yang memengaruhi antara lain relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, minimnya kemampuan anak untuk melindungi diri, serta kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Selain itu, budaya diam (*silence culture*) yang masih melekat pada keluarga maupun masyarakat membuat banyak anak tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dengan demikian, dominasi kekerasan seksual terhadap anak menegaskan pentingnya edukasi perlindungan diri sejak dini, penguatan peran keluarga dan sekolah sebagai benteng pertama perlindungan anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera dan menjamin pemenuhan hak anak atas rasa aman.

Berdasarkan rekapitulasi dari SIMFONI PPA, pada tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang tercatat 5 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang seluruhnya terjadi di ranah rumah tangga, dengan rincian kekerasan seksual, penelantaran, serta bentuk kekerasan lainnya. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak jauh lebih tinggi, yakni didominasi oleh anak perempuan, dengan jenis kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan seksual. Gambaran ini menunjukkan bahwa baik perempuan dewasa maupun anak-anak, khususnya anak perempuan, masih menghadapi kerentanan yang serius, terutama di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang paling aman yaitu rumah tangga.

Baik data pada tahun 2024 dan 2023 dan tahun-tahun sebelumnya diketahui kasus yang terlapor sebagian besar menimpa anak perempuan, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Namun demikian, harus diakui bahwa masih banyak kasus yang tidak tercatat, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dewasa. Rendahnya angka pelaporan disebabkan oleh kekhawatiran korban akan terbongkarnya identitas, terutama jika pelaku adalah suami atau orang dekat, serta adanya tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa data yang ada kemungkinan masih merupakan puncak dari gunung es kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

8.4 Sarana Pelayanan

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bengkulu telah dibentuk dan ditunjuk tempat pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu:

- a. UPT PPA (Unit pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bengkulu.
- b. UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bengkulu untuk pelayanan hukum bagi korban kekerasan dan perdagangan manusia.
- c. Pelayanan Medis
- d. Rumah Singgah pada UPT PPA untuk perlindungan sementara selama proses penyidikan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan sarana rehabilitasi sosial dan re-integrasi belum tersedia.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada Buku Profil Gender Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

9.1.1 Ketersediaan Data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di kabupaten Bengkayang untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, agar responsif gender.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan sampai kelurahan agar mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender.

9.1.2 Kontruksi Gender

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkayang meningkat dari 82,79% (2021) menjadi 84,06% (2024), namun masih tertinggal dari Provinsi Kalimantan Barat sebesar 88,2% (2024) dan Nasional dengan angka 91,85% (2024). Hal ini menunjukkan kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Bengkayang masih perlu diperhatikan guna mengurangi ketimpangan yang ada.
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bengkayang meningkat dari 71,38% (2021) menjadi 76,94% (2024), sedikit lebih tinggi dari provinsi (77,14%) dan melampaui IDG Nasional yang pada tahun 2024 turun menjadi 71,58%. Meski demikian, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkayang masih relatif rendah, yang berarti adanya kesenjangan dalam capaian dasar (pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja) masih tertinggal.
- c. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2024 sebesar 50,65%, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 (49,42%). Hal ini menandakan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial sudah diperhatikan.
Namun, meskipun keterlibatan meningkat, pendapatan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki sehingga kesetaraan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

- d. Keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Bengkayang sebesar 23,33%, menunjukkan partisipasi sudah ada namun masih di bawah target ideal 30%.

9.1.3 Kependudukan

- a. Sex ratio Kabupaten Bengkayang sebesar 108% menunjukkan jumlah laki-laki sekitar 8% lebih banyak dibandingkan perempuan, sehingga struktur penduduk masih didominasi oleh penduduk laki-laki.
- b. Angka ketergantungan di Kabupaten Bengkayang menurun dari 45,38% (2022) menjadi 45,19% (2024), menunjukkan berkurangnya beban penduduk usia produktif. Berdasarkan jenis kelamin, angka ketergantungan perempuan (46,53%) lebih tinggi dibanding laki-laki (43,97%) karena Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan cenderung lebih besar, sehingga jumlah lansia perempuan lebih banyak.
- c. Kepemilikan akta kelahiran laki-laki sebanyak 91,39% dan perempuan sebesar 92,38%.

9.1.4 Kesehatan

- a. Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir dan pada tahun 2024 sebesar 74,72%. Artinya adanya perbaikan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang, terkait peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 menurun menjadi total 4 kasus ibu dibanding tahun 2022 (11 kasus) dan 2021 (13 kasus). Meskipun begitu diharapkan upaya dari dinas kesehatan, peran ayah dan keluarga, serta ibu harus lebih diperhatikan terkait kesehatan ibu ketika hamil hingga melahirkan.
- c. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2022 sebanyak 16 kasus, sedangkan kematian balita terdapat 19 kasus. Bayi memerlukan perhatian kesehatan khusus karena tubuh bayi usia kurang dari 1 bulan sangat lemah dan rentan terkena penyakit.
- d. Anak Lahir Hidup (ALH) yang memiliki berat badan dibawah 2,5 kg (14,64%) lebih sedikit daripada ALH dengan berat badan normal atau lebih dari 2,5 Kg (85,36%). Hal ini menandakan bahwa pemenuhan gizi ibu hamil dan bayi baru lahir cukup baik.
- e. Penggunaan alat kontrasepsi (KB) di Kabupaten Bengkayang tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 22,45% perempuan pernah menggunakan KB, 57,17% sedang menggunakan, dan hanya 20,38% yang tidak pernah menggunakan. Data ini menggambarkan bahwa kesejahteraan perempuan dalam hal kesehatan reproduksi cukup baik, karena mayoritas perempuan memiliki akses dan kesadaran untuk menjaga kesehatan diri serta mengatur rencana keluarga serta membantu pemerintah

dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk.

- f. Median Usia Kawin Pertama (UKP) tahun 2024 pada laki-laki berada di angka 24 tahun dan perempuan 20 tahun dengan median total 22 tahun.

9.1.5 Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2024, umur 7-12 tahun pada laki-laki sebesar 100% dan perempuan sebanyak 98,13%; APS umur 13-15 tahun pada laki-laki sebesar 90,72% dan perempuan 97,23%; artinya APS pada kelompok usia 7-15 tahun memperoleh akses pendidikan atau mengikuti wajib belajar 9 tahun. Meskipun seharusnya program wajib belajar hingga 12 tahun, hal ini terlihat dari data APS kelompok umur 16-18 tahun masih rendah dengan total 74,14% dengan rincian partisipasi laki-laki (69,95%) dan perempuan (78,94%).
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bengkayang tercatat pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A (111,81%), kemudian SMP/MTS/Paket B (78%) dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C (93,8%).
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bengkayang pada jenjang pendidikan SD total 98,62% dengan partisipasi laki-laki (100%) dan perempuan (97,05%); kemudian pada jenjang SMP tercatat total sebesar 68,90% dengan rincian laki-laki (69,78%) dan perempuan (68,15%); pada jenjang pendidikan SMA memiliki total sebesar 61,39% dengan jumlah partisipasi laki-laki (57,84%) dan perempuan (65,45%).
- d. Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 tercatat sebesar 96,47% laki-laki yang mampu membaca dan menulis huruf latin dan 10,70%. Kemudian perempuan yang dapat membaca dan menulis huruf latin sebesar 94,65% dan huruf lainnya sebesar 10,50%.
- e. Pendidikan Tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Bengkayang tahun 2024 tercatat 23,32% menyelesaikan pendidikan SD/Sederajat, sebanyak 21,38% tamat SMP/Sederajat, dan 36,44% menyelesaikan pendidikan SMA atau jenjang pendidikan lebih tinggi.

9.1.6 Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun terakhir terus meningkat. Data terakhir pada tahun 2024 tercatat partisipasi laki-laki sebesar 86,85% dan perempuan sebesar 56,88%. Partisipasi angkatan kerja pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, hal ini disebabkan karena secara umum laki-laki

memiliki tanggung jawab lebih besar memenuhi kebutuhan ekonomi dibanding penduduk perempuan.

- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 di Kabupaten Bengkayang sebesar 2,81% dengan TPT pada laki-laki (3,04%) dan perempuan (2,41%). Selama 4 tahun terakhir TPT di Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuasi namun pada data terakhir tahun 2024 mengalami penurunan yang menandakan bahwa penciptaan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan masih perlu menjadi perhatian.
- c. Status Pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah Kabupaten Bengkayang paling banyak sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan persentase laki-laki (22,67%) dan perempuan (10,55%). Pekerjaan utama penduduk ada di sektor pertanian, terbukti dengan data Lapangan Pekerjaan Utama pada sektor pertanian sebesar 51,35% lebih unggul dibandingkan jasa (31,83%) dan manufaktur (16,83%).
- d. Garis Kemiskinan pada tahun 2024 di Kabupaten Bengkayang terdapat 16,35 ribu jiwa dengan persentase 6 dan minimal pengeluaran Rp 440,39 ribu rupiah/kapita/bulan. Selama 4 tahun terakhir persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun justru menunjukkan tren menurun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan total penduduk dan peningkatan jumlah penduduk non-miskin lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk miskin, sehingga secara proporsional tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkayang semakin membaik.

9.1.7 Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

- a. Keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif di Kabupaten Bengkayang belum mencapai angka minimal 30% tapi masih 23,33% sedangkan laki-laki masih unggul dengan persentase 76,67% masih terjadi ketimpangan pada kursi DPRD yang didominasi laki-laki.
- b. Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Bengkayang masih kalah jauh dengan laki-laki. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepebuhnya memihak pada kepentingan perempuan.

9.1.8 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- a. SIMFONI PPPA mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 sebanyak 42 total kasus dengan rincian 39 orang korban perempuan dan 3 korban anak laki-laki.
- b. Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi pada kelompok usia dini yaitu anak usia 6-12 tahun dengan persentase 51,30 dan kasus pada usia remaja 13-17 tahun (38,50%) dibandingkan dengan usia dewasa yakni usia 18–24 tahun (2,6%), 25–44 tahun (5,1%), dan 45–59 tahun (2,6%). Termasuk korban anak laki-laki yang

berada di kelompok usia 13-17 tahun. Artinya anak-anak dan remaja masuk dalam kelompok usia paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi.

9.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada Buku Profil Gender Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan, sebagai berikut:

- a. Kerjasama, komunikasi, dan koordinasi antar lembaga-lembaga atau OPD yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender supaya lebih terbuka dan kooperatif sehingga data dan informasi lebih lengkap, mudah, dan efektif.
- b. Perlunya pelaksanaan pengkajian yang mendalam terhadap hasil dan analisa serta peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di wilayah pemerintahan Kabupaten Bengkayang.